

LAPORAN TAHUNAN 2022



DIREKTORAT PENGAWASAN
KOSMETIK

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Direktorat Pengawasan Kosmetik dapat menyelesaikan tugas dan fungsinya selama tahun anggaran 2022 dan dapat menghadirkan laporan tahunan ini.

Laporan tahunan ini merupakan gambaran kegiatan Direktorat Pengawasan Kosmetik, Badan POM RI yang telah dilaksanakan dan dicapai selama tahun 2022. Semoga semua yang telah dihasilkan dari kinerja yang baik dari seluruh jajaran di lingkungan Direktorat Pengawasan Kosmetik dapat mendukung misi dan visi Badan POM untuk memastikan obat dan makanan termasuk kosmetik aman, bermutu dan berdaya saing demi melindungi masyarakat dan mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Diharapkan, buku laporan tahun ini dapat bermanfaat dalam menyediakan informasi yang memadai bagi pihak yang membutuhkannya.

Jakarta, 15 Maret 2023

Plt. Direktur Pengawasan Kosmetik



Irwan, S.Si, Apt, M.K.M

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GRAFIK	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	5
C. Aspek Strategis Organisasi	6
D. Permasalahan Utama (Strategic Issue)	7
BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA	9
A. Sumber Daya Manusia	9
B. Sarana dan Prasarana	10
C. Anggaran.....	11
BAB III HASIL KEGIATAN	15
SK 1. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi kosmetik	18
SK 2. Kualitas pengawasan kosmetik di Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang Optimal	37
SK 3. Pelayanan Publik di bidang pengawasan kosmetik yang prima	41
SK 4. Meningkatnya efektifitas pengawasan kosmetik	53
SK 5. Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik	80
SK 6. Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	83
SK 7. Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang Efektif.....	90
SK 8. SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal	96
SK 9. Sistem Operasional termasuk TIK terintegrasi dan adaptif di Direktorat Pengawasan Kosmetik	99
SK 10. Terkelolanya keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik secara Akuntabel	101
BAB IV PENUTUP	105
KESIMPULAN	105

SARAN.....105

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Kegiatan dan IKU Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2022 ..	3
Tabel 2. Data BMN Direktorat Pengawasan Kosmetik per 31 Desember 2022	11
Tabel 3 Realisasi Anggaran Tahun 2022 per Indikator Kinerja.....	12
Tabel 4 Capaian Kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2022.....	15
Tabel 5 Realisasi Persentase Sarana Kosmetik Memeuhi Ketentuan	18
Tabel 6 Realisasi tahun 2022 dengan Target Akhir Tahun Renstra.....	20
Tabel 7 Realisasi Indikator Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan .	20
Tabel 8 Perbandingan Realisasi tahun 2022 dengan Target Akhir Tahun Renstra..	22
Tabel 9 Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM.....	37
Tabel 10 Realisasi tahun 2022 dengan Target Akhir Tahun Renstra.....	38
Tabel 11 Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik.....	42
Tabel 12 Realisasi tahun 2022 dengan Target Akhir Tahun Renstra.....	43
Tabel 13 Realisasi Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	53
Tabel 14 Realisasi tahun 2022 dengan Target Akhir Tahun Renstra.....	54
Tabel 15 Realisasi Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder	55
Tabel 16 Realisasi tahun 2022 dengan Target Akhir Tahun Renstra.....	56
Tabel 17 Realisasi Persentase laporan keamanan kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	56
Tabel 18 Realisasi tahun 2022 dengan Target Akhir Tahun Renstra.....	57
Tabel 19 Realisasi Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	81
Tabel 20 Realisasi tahun 2022 dengan Target Akhir Tahun Renstra.....	82
Tabel 21 Realisasi Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu	84
Tabel 22 Realisasi tahun 2022 dengan Target Akhir Tahun Renstra.....	85
Tabel 23 Realisasi Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik.....	85
Tabel 24 Realisasi tahun 2022 dengan Target Akhir Tahun Renstra.....	86
Tabel 25 Realisasi Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu	90
Tabel 26 Realisasi tahun 2022 dengan Target Akhir Tahun Renstra.....	91
Tabel 27 Realisasi Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik ..	96
Tabel 28 Realisasi tahun 2022 dengan Target Akhir Tahun Renstra.....	97

Tabel 29 Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal.....	100
Tabel 30 Realisasi tahun 2022 dengan Target Akhir Tahun Renstra.....	100
Tabel 31 Realisasi Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik.....	102
Tabel 32 Realisasi tahun 2022 dengan Target Akhir Tahun Renstra.....	103

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Stuktur Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik	5
Grafik 2 Data pegawai Direktorat Pengawasan Kosmetik per 31 Desember 2022	9
Grafik 3 Data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.....	9
Grafik 4 Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya	19
Grafik 5 Perbandingan Realisasi Persentase Iklan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya	21
Grafik 6 Hasil Pengawasan Iklan Kosmetik 2020 - 2022	25
Grafik 7 Rincian Iklan Kosmetik 2020 – 2022.....	26
Grafik 8 Hasil Pengawasan Iklan Kosmetik Berdasarkan Media 2020 – 2022.....	27
Grafik 9 Perbandingan Realisasi Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM 2022 dengan Tahun Sebelumnya	38
Grafik 10 Hasil Pengujian Kosmetik Tahun 2020-2022	40
Grafik 11 Rincian TMS Pengujian Kosmetik Tahun 2020 – 2022	41
Grafik 12 Perbandingan Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik 2022 dengan Tahun Sebelumnya	42
Grafik 13 Perbandingan Realisasi Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya	54
Grafik 14 Perbandingan Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya.....	55
Grafik 15 Perbandingan Persentase laporan keamanan kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya	57
Grafik 16 Hasil Pengawasan Penandaan Kosmetik Tahun 2020 -2022.....	72
Grafik 17 Rincian Temuan Kosmetik TMK Penandaan Tahun 2020 - 2021.....	73
Grafik 18 Perbandingan Realisasi Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya.....	81
Grafik 19 Perbandingan Realisasi Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya.....	84
Grafik 20 Perbandingan Realisasi Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya.....	86
Grafik 21 Perbandingan Realisasi Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya	91
Grafik 22 Perbandingan Realisasi Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya.....	97

Grafik 23 Perbandingan Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya 100

Grafik 24 Perbandingan Realisasi Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya 102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2020 – 2024: Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, yaitu:

“Obat dan Makanan Aman, Bermutu, dan Berdaya Saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Mengingat Direktorat Pengawasan Kosmetik merupakan salah satu unit teknis di BPOM yang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Visi BPOM, maka diharapkan Direktorat Pengawasan Kosmetik dapat secara optimal memberikan kontribusi yang signifikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mewujudkan visi tersebut terutama dalam bidang pengawasan kosmetik.

MISI

Dalam mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata sesuai dengan penguatan peran Direktorat Pengawasan Kosmetik yang mengacu pada misi Badan POM sebagai berikut :

- a. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
- c. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi dan misi pengawasan obat dan makanan, maka tujuan Direktorat Pengawasan Kosmetik sebagai berikut .:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan kosmetik.
2. Meningkatnya kapasitas SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik dan pemangku kepentingan, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan kosmetik.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industry kosmetik serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan kosmetik yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kelembagaan dibidang pengawasan kosmetik yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

PROGRAM

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan seperti tersebut di atas, program Direktorat Pengawasan Kosmetik yang merupakan bagian dari pengawasan sehingga mengacu pada rencana strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan :

Program Pengawasan Obat dan Makanan

KEGIATAN UTAMA

Untuk mendukung terwujudnya program Direktorat Pengawasan Kosmetik ditetapkan kegiatan utama Direktorat Pengawasan Kosmetik yaitu :

- a. Jumlah keputusan hasil pengawasan Kosmetika yang diselesaikan tepat waktu
- b. Jumlah permohonan penilaian sarana dan produk Kosmetika yang diselesaikan tepat waktu

Selain kegiatan utama tersebut Direktorat Pengawasan Kosmetik juga menetapkan Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Utama untuk mendukung pencapaian Program tersebut. Pada tahun 2022 Direktorat Pengawasan Kosmetik memiliki 10 Sasaran Kegiatan dan 14 Indikator Kinerja Utama dengan rincian Sebagai berikut:

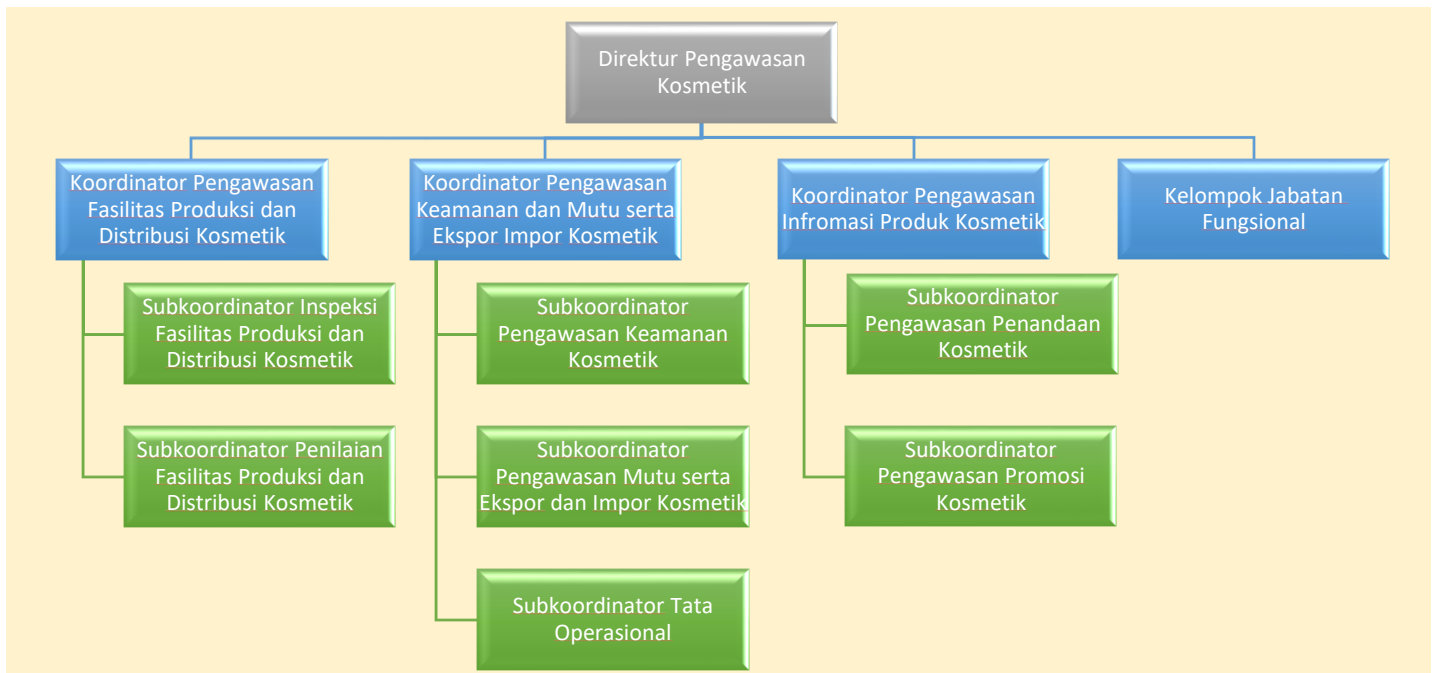
Tabel 1 Sasaran Kegiatan dan IKU Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume Target
1	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi kosmetik	Persentase sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan	87%
		Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan	87%
2	Kualitas pengawasan kosmetik di Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang Optimal	Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	85%
3	Pelayanan Publik di bidang pengawasan kosmetik yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	84.50
4	Meningkatnya efektifitas pengawasan kosmetik	Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	87%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume Target
		Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder	83%
		Persentase laporan keamanan kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	90%
5	Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik	Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	82%
6	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu	92%
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik	4.51
7	Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang Efektif	Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik	81
8	SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik	82
9	Sistem Operasional termasuk TIK terintegrasi dan adaptif di Direktorat Pengawasan Kosmetik	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	2.25
10	Terkelolanya keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik secara Akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik	100% (Efisien)

B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik adalah sebagai berikut:



Grafik 1 Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Bagian keenam Pasal 70, Direktorat Pengawasan Kosmetik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan mempunyai tugas:

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan kosmetik.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pengawasan Kosmetik menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor kosmetik;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor kosmetik;

3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, serta kriteria di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor kosmetik;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor kosmetik;
5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor kosmetik; dan
6. pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

C. Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan proyeksi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia sebagai negara besar mempunyai jumlah penduduk pada tahun 2022 mencapai 274 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 138 juta jiwa laki-laki dan 136 juta jiwa perempuan, dengan populasi terbesar pada penduduk usia 5 – 39 tahun berada di kisaran jumlah $10 \text{ juta} \leq x \leq 15 \text{ juta}^*$. Ditinjau dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki kekuatan dalam sumber daya manusia yang produktif.

Dapat dikatakan bahwa dengan besaran jumlah serta kisaran usia tersebut, penduduk Indonesia merupakan konsumen aktif, sehingga Indonesia menjadi potensi pasar yang besar, baik bagi produk lokal maupun produk impor. Adanya dinamika teknologi, gaya hidup dan era globalisasi, banyak kendala dan tantangan yang harus dihadapi maupun peluang yang harus dikelola oleh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang kuat, sehat dan memiliki tingkat pendidikan yang baik.

Berdasarkan hal di atas dapat membuka peluang bagi para pelaku usaha kosmetik di dalam negeri untuk melakukan peningkatan jumlah produk kosmetik sehingga dapat memenuhi kebutuhan akan produk kosmetik di dalam negeri. Realitas menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah menjadi pasar bagi produk kosmetik dari luar negeri. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam menggunakan, kosmetik.

Dalam rangka melindungi industri kosmetik khususnya UMKM kosmetik di Indonesia terhadap gempuran produk kosmetik dari negara luar diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk memajukan UMKM kosmetik di Indonesia. Ketersediaan kosmetik di pasaran dengan harga terjangkau memerlukan dukungan Pemerintah, dimana kosmetik yang beredar di pasaran bermutu, aman dan bermanfaat sehingga mampu bersaing dengan kosmetik impor.

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan antara lain makin banyaknya distribusi kosmetik ke tempat tujuan di seluruh wilayah Indonesia semakin cepat, sehingga antisipasi pengawasan kosmetik juga harus sama cepatnya. Bagi pengawasan kosmetik, ini merupakan potential problem, karena bila terdapat produk yang tidak memenuhi standar, peredarannya dapat menjangkau area yang luas dalam waktu yang relatif singkat. Dengan berkembangnya teknologi modern saat ini, industry kini juga mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan "range" yang sangat luas. Disamping itu, dengan meningkatnya perkembangan teknologi informasi, maka segala informasi tentang kosmetik akan dengan mudah diperoleh, bahkan cara pembelian pun cukup dengan menggunakan perangkat elektronik seperti HP dan Komputer.

Direktorat Pengawasan Kosmetik menyadari dalam pengawasan kosmetik tidak dapat dilakukan sendiri atau menjadi single player. Untuk itu Direktorat Pengawasan Kosmetik mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga, baik di pusat, daerah, maupun internasional. Beberapa jejaring kerja yang sudah dimiliki, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal (Pusat dan Daerah).

D. Permasalahan Utama (Strategic Issue)

Beberapa isu strategis yang menjadi dasar penetapan kinerja Dirrektorat Pengawasan Kosmetik pada tahun 2022 yaitu:

1. Jumlah inspektur kosmetik tidak sebanding dengan sarana yang diawasi
2. Masih ditemukan produk tanpa izin edar dan/atau kadaluarsa di sarana produksi dan/atau distribusi kosmetik.
3. Masih banyak kosmetik yang tidak ternoifikasi dan/atau tidak memenuhi syarat yang beredar

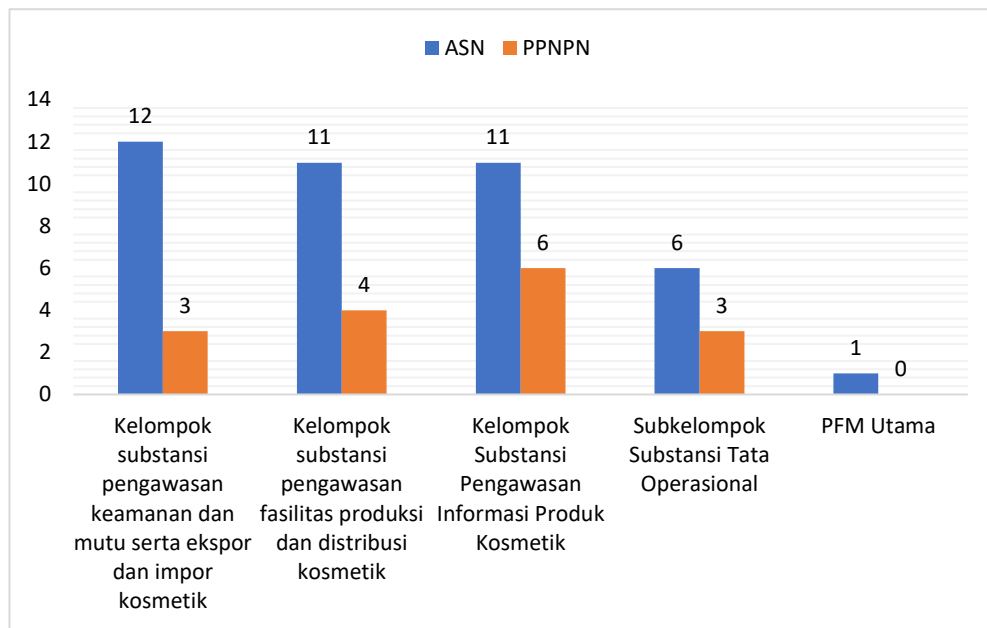
4. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menjamin kosmetik yang diedarkan terjamin keamanan, mutu dan bermanfaat bagi masyarakat.
5. Kurangnya koordinasi dan persamaan persepsi dengan lintas sektor terkait pengawasan kosmetik.
6. Maraknya iklan kosmetika Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan ilegal pada media daring sebagai dampak *digital disruption*.
7. Banyak UMKM kosmetik yang belum mengetahui dan memahami terkait regulasi dibidang kosmetik
8. Penerapan QR Code pada kemasan produk kosmetik masih menjadi tantangan baru
9. Hasil pengawasan dilapangan masih ditemukan sabun dengan ijin PKRT

BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA

A. Sumber Daya Manusia

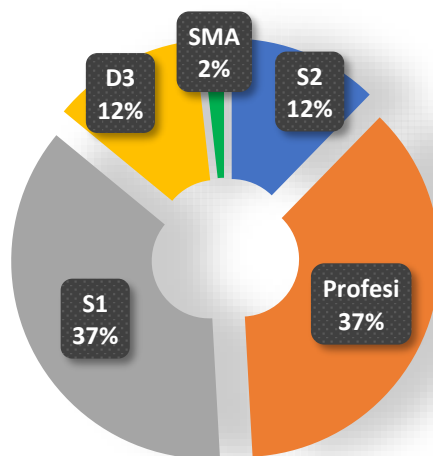
a. Data Kepegawaian

Jumlah pegawai Direktorat Pengawasan Kosmetik per 31 Desember 2022 adalah 41 orang Apartur Sipil Negara (ASN), 16 Orang Pramubakti sebagai berikut :



Grafik 2 Data pegawai Direktorat Pengawasan Kosmetik per 31 Desember 2022

Data pegawai Direktorat Pengawasan Kosmetik berdasarkan tingkat Pendidikan sebagai berikut: Magister 7 orang, Apoteker 21 orang, Sarjana 21 orang, Diploma III 7 orang, SMA 1 orang.



Grafik 3 Data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

b. Kebutuhan Pegawai

Berdasarkan penghitungan Analisis Beban Kerja (ABK) Direktorat Pengawasan Kosmetik tahun 2022 sebagaimana terdapat dalam Lampiran, total kebutuhan pegawai di Direktorat Pengawasan Kosmetik adalah sebanyak 106 pegawai. Sedangkan kondisi eksisting saat ini adalah sebanyak 57 pegawai sehingga masih terdapat gap antara jumlah kebutuhan pegawai yang diharapkan dengan jumlah pegawai saat ini. Untuk hal tersebut Direktorat Pengawasan Kosmetik telah mengajukan usulan untuk penambahan pegawai melalui penerimaan CPNS baru. Hal ini diperlukan guna untuk meningkatkan kinerja pengawasan kosmetik sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki.

c. Peningkatan Kompetensi

Pada tahun 2022 seluruh pegawai Direktorat Pengawasan Kosmetik telah memenuhi minimal pengembangan kompetensi sebanyak 20 JP. Jenis peningkatan kompetensi yang diikuti oleh pegawai berupa Bimtek, workshop, seminar, training, dll.

B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang yang sangat penting dalam melakukan pekerjaan. Pada tahun 2022 Direktorat Pengawasan Kosmetik telah melakukan pengadaan alat pengolah data berupa 1 set Logitech Grup Vidio Conference yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan rapat-rapat yang diadakan secara virtual, Laptop sebanyak 5 pcs, Tablet sebanyak 5 pcs yang digunakan untuk menunjang kinerja seperti melakukan rapat-rapat secara virtual dalam waktu bersamaan sehingga memerlukan perangkat lain yang dapat digunakan serta pengadaan printer portable sebanyak 4 pcs yang digunakan pada saat melaksanakan inspeksi ke lapangan. Dengan jumlah pengadaan yang telah dilakukan pada tahun 2022 dirasa masih kurang untuk memenuhi total dari kebutuhan APD yang diharapkan. Kondisi existing Sarana dan alat pengolah data Direktorat Pengawasan Kosmetik tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Data BMN Direktorat Pengawasan Kosmetik per 31 Desember 2022

Keterangan	Total BMN	Jumlah BMN dalam keadaan Rusak	Kondisi yang di harapkan	GAP
PC Unit	41	18	60	37
Laptop	61	19	60	18
Printer	50	16	60	26
Scanner	9	2	10	3
Tablet	5	0	5	0
Vidio Conference	1	0	1	0
Penghancur Kertas	0	0	1	1
TV	1	0	1	1

Berdasarkan data BMN pada akhir tahun 2022 maka masih terdapat gap antara kebutuhan alat pengolah data dengan kondisi yang ada sekarang. Sehingga diharapkan agar gap tersebut dapat segera dipenuhi guna mendukung untuk meningkatkan kinerja agar lebih optimal.

C. Anggaran

a. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022 Direktorat Pengawasan Kosmetik mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.287.950.000,- sesuai dengan DIPA yang di terbitkan pada tanggal 17 November 2021. Pada akhir tahun 2022 Direktorat Pengawasan Kosmetik melakukan penghematan anggaran (Automatic Adjustment) sebesar Rp. 1.147.116.000,- sehingga pagu anggaran pada akhir tahun menjadi sebesar Rp. 8.140.834.000,-

Realisasi anggaran yang telah dicapai Direktorat Pengawasan Kosmetik pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 8.139.426.374,- atau setara dengan 99.98% dibandingkan dengan pagu akhir tahun 2022.

Anggaran yang tersedia telah digunakan untuk mencapai target kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja tahun 2022, dimana terdapat 10 sasaran kegiatan dan 14 indikator kinerja utama yang harus diselesaikan oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik. Rincian Realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Realisasi Anggaran Tahun 2022 per Indikator Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	PAGU	REALISASI	%
1	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi kosmetik	Persentase sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan	670.854.700	670.852.662	100,00%
		Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan	644.503.000	643.444.378	99,84%
2	Kualitas pengawasan kosmetik di Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang Optimal	Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	220.857.000	220.792.156	99,97%
3	Pelayanan Publik di bidang pengawasan kosmetik yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	1.155.101.300	1.155.071.470	100,00%
4	Meningkatnya efektifitas pengawasan kosmetik	Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	1.509.485.000	1.509.367.049	99,99%
		Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder	243.626.000	243.622.188	100,00%
		Persentase laporan keamanan kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	714.369.000	714.346.310	100,00%
5	Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik	Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	256.414.000	256.379.315	99,99%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	PAGU	REALISASI	%
6	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu	1.018.701.500	1.018.693.444	100,00%
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik	823.700.500	823.682.027	100,00%
7	Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang Efektif	Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik	310.730.250	310.686.126	99,99%
8	SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik	490.175.000	490.174.041	100,00%
9	Sistem Operasional termasuk TIK terintegrasi dan adaptif di Direktorat Pengawasan Kosmetik	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	67.736.750	67.735.209	100,00%
10	Terkelolanya keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik secara Akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik	14.580.000	14.580.000	100,00%

b. Penerimaan PNBP

Pada tahun 2022 target penerimaan PNBP Direktorat Pengawasan Kosmetik adalah sebesar Rp. 18.685.800.000. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Pengawasan Kosmetik tahun 2022 sebesar Rp. 22.826.650.000,- realisasi tersebut telah melebihi target yang di tetapkan dengan persentase capaian yaitu sebesar 122% dari target tahun 2022. Realisasi penerimaan tersebut terdiri atas 2 pelayanan yaitu 1). pelayanan

publik Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE) Kosmetik sebesar Rp. 21.417.300.000,- dan 2). Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) sebesar Rp. 1.409.350.000.

BAB III HASIL KEGIATAN

Capaian kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik tahun 2022 diukur dengan membandingkan realisasi kinerja terhadap target kinerja pada tahun tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 10 sasaran kegiatan dan 14 indikator kinerja utama yang terbagi kedalam tiga perpektif. Rincian dari hasil pengukuran dapat dilihat pada table berikut:

Dari hasil pengukuran kinerja di peroleh hasil bahwa 8 Sasaran kegiatan tercapai dengan kategori memenuhi ekspektasi, 1 sasaran kegiatan dengan kategori belum memenuhi ekspektasi, dan 1 sasaran kegiatan dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Rincian dari hasil pengukuran dapat dilihat pada table berikut

Tabel 4 Capaian Kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume			Nilai Capaian per Sasaran (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi kosmetik	Persentase sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan	87%	71,47%	82,15%	86.93%
		Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan	87%	79,79%	91,71%	
2	Kualitas pengawasan kosmetik di Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang Optimal	Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	85%	97,26%	114,42%	114.42%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume			Nilai Capaian per Sasaran (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
3	Pelayanan Publik di bidang pengawasan kosmetik yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	84,5	85,35	101,01%	101.01%
4	Meningkatnya efektifitas pengawasan kosmetik	Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	87%	87,26%	100,29%	103.97%
		Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder	83%	84,52%	101,83%	
		Persentase laporan keamanan kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	90%	98,81%	109,79%	
5	Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik	Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	82%	92,86%	113,24%	113.24%
6	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu	92%	96,52%	104,91%	104.12%
		Indeks Pelayanan Publik di bidang	4,51	4,66	103,33%	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume			Nilai Capaian per Sasaran (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Pengawasan Kosmetik				
7	Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang Efektif	Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik	81	90,74	112,02%	112.02%
8	SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik	82	85,59	104,38%	104.38%
9	Sistem Operasional termasuk TIK terintegrasi dan adaptif di Direktorat Pengawasan Kosmetik	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	2,25	3	133,33%	133.33%
10	Terkelolanya keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik secara Akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik	100%	100%	100,00%	100%

Kriteria Pencapaian sasaran Strategis

Kriteria	Capaian	Kesimpulan Efektifitas
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	
Memenuhi Ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Efektif
Belum Memenuhi Ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kurang Efektif
Tidak Memenuhi Ekspektasi	$x < 80\%$	Tidak efektif

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksudkan untuk menjelaskan perbandingan capaian kinerja terhadap target kinerja tahunan dan terhadap target jangka menengah / target akhir tahun Renstra, upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target, kendala dan upaya perbaikan yang dilakukan dalam perbaikan capaian kinerja di periode selanjutnya. Evaluasi dan analisis capaian kinerja dari masing-masing sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

SK 1

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi kosmetik

SK 1. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi kosmetik

Pada tahun 2022 capaian sasaran kegiatan meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi kosmetik adalah sebesar 86.93% capaian tersebut masuk dalam kategori belum memenuhi ekspektasi. Sasaran kegiatan tersebut didukung oleh 2 indikator kinerja utama yaitu persentase sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan dan persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan.

IK-1. Persentase sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan, indikator ini bertujuan untuk mengukur atau mengetahui seberapa banyak sarana produksi dan sarana distribusi kosmetik yang telah menerapkan aspek-aspek CPKB secara konsisten dan memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

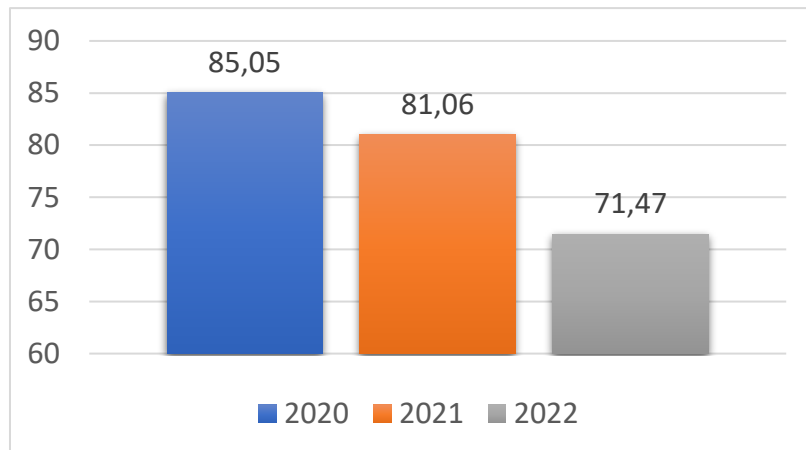
Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2022

Tabel 5 Realisasi Persentase Sarana Kosmetik Memeuhi Ketentuan

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan	87	71.47	82.15	Belum Memenuhi Ekspektasi

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi IK-1 adalah sebesar 71.47% dengan capaian 82.15%. Capaian tersebut masih belum memenuhi target sehingga masuk dalam kategori Belum Memenuhi Ekspektasi.

Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 4 Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data di atas dapat dilihat perbandingan realisasi dari tahun 2020 – 2022 mengalami penurunan tiap tahun nya. Penurunan tersebut disebabkan antara lain karena Pertumbuhan pelaku usaha kosmetik yang pesat berdampak terhadap jumlah target pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik yang meningkat. Selain itu telah kembali normalnya kondisi pasca pandemi pada tahun 2022 yang menyebabkan kegiatan jual-beli kosmetik maupun pengawasan juga dapat berjalan lebih optimal dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah sarana produksi kosmetik yang TMK terutama terletak pada peningkatan jumlah temuan terkait penerapan CPKB yang disebabkan karena ketidakpatuhan pelaku usaha dalam pelaksanaan regulasi dimana penerapan CPKB masih dianggap sebagai syarat untuk mendapatkan “izin” untuk melakukan produksi dan notifikasi produk dan belum dianggap sebagai sebuah komitmen yang harus selalu diterapkan untuk menjamin mutu produk kosmetik yang dihasilkan. Begitu pula dengan hasil pengawasan pada sarana distribusi dimana masih ditemukan sarana distribusi yang menjual produk-produk kosmetik TIE atau mengandung bahan berbahaya. Peredaran kosmetik yang luas dan menjangkau seluruh kalangan masyarakat juga menyebabkan tingginya potensi pelanggaran yang terjadi jika tidak diimbangi dengan edukasi

kepada masyarakat selaku konsumen. Selama demand atas kosmetik TIE atau kosmetik yang mengandung bahan berbahaya masih tinggi maka masih akan ditemukan peredaran kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan. Mayoritas sarana produksi merupakan UMKM dan sering kali terkendala dengan keterbatasan SDM, termasuk kompetensi penanggung jawab teknis yang masih kurang dan keterbatasan modal.

Perbandingan Realisasi tahun 2022 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Tabel 6 Realisasi tahun 2022 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan	89	71.47	80.30	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi IK-1 tahun 2022 belum sepenuhnya mencapai target jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra. Masih diperlukan upaya perbaikan guna meningkatkan capaian kinerja agar target pada akhir tahun renstra dapat tercapai.

IK-2 Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan, indikator ini bertujuan untuk mengukur atau mengetahui seberapa banyak iklan kosmetik yang beredar/ yang diawasi memenuhi ketentuan berdasarkan peraturan yang berlaku. Iklan yang diawasi dapat berasal dari berbagai media seperti media cetak, media luar ruang, dan media digital. Iklan yang diawasi adalah iklan kosmetik yang dibuat oleh pemilik nomor notifikasi.

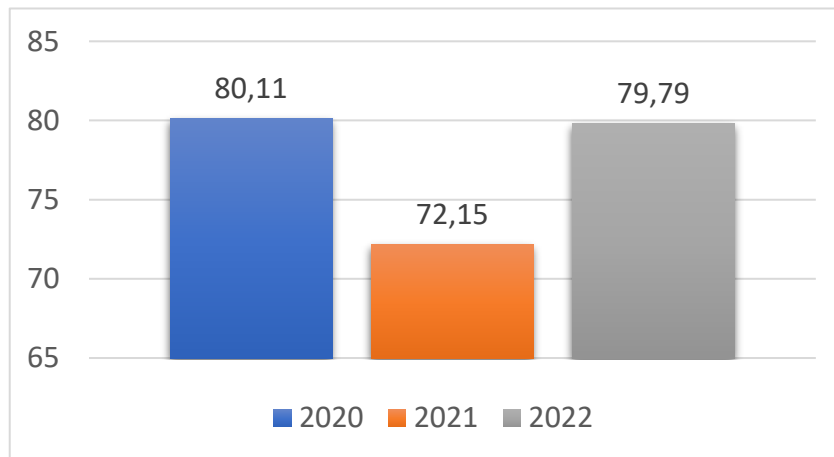
Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2022

Tabel 7 Realisasi Indikator Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan	87	79.79	91.71	Belum Memenuhi Ekspektasi

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi IK-2 adalah sebesar 79.79% dengan capaian 91.71%. Capaian tersebut masih belum memenuhi target sehingga masuk dalam kategori Belum Memenuhi Ekspektasi.

Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 5 Perbandingan Realisasi Persentase Iklan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dari tahun 2020 – 2022. Pada tahun 2021 sempat mengalami penurunan dari tahun 2020 dan Kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022. Beberapa factor yang menyebabkan tidak tercapainya indikator tersebut adalah karena Pembuatan iklan di media online lebih mudah dan lebih ekonomis dibandingkan dengan membuat iklan di media konvensional, namun dengan kemudahan tersebut berpotensi munculnya klaim yang dilarang/klaim yang seolah2 obat, bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, Sebagai dampak dari digital disruption dan perubahan gaya hidup yang cenderung memanfaatkan media daring tersebut, maka target pengawasan iklan pada tahun 2022 berbasis risiko dengan proporsi pengawasan diprioritaskan di media online. Disamping itu, pelaku usaha kosmetik membuat klaim berlebihan agar menarik konsumen (sebagai selling point), ditambah dengan tidak adanya evaluasi pre-market untuk iklan kosmetik sehingga jumlah iklan yang TMK meningkat.

Perbandingan Realisasi tahun 2022 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Tabel 8 Perbandingan Realisasi tahun 2022 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan	89	79.79	89.65	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi IK-2 tahun 2022 belum sepenuhnya mencapai target jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra. Masih diperlukan upaya perbaikan guna meningkatkan capaian kinerja agar target pada akhir tahun renstra dapat tercapai.

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022 dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Intensifikasi Pemeriksaan dan Penelusuran Sarana Produksi, Distribusi dan Importir yang Berdasarkan Hasil Pengawasan Diduga Memproduksi dan Mengedarkan Kosmetika Ilegal dan Tidak Memenuhi Syarat

Pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi merupakan salah satu kegiatan pengawasan setelah produk beredar (post market), yang dilakukan dalam bentuk pemeriksaan sarana. Pemeriksaan ini secara rutin dilaksanakan oleh Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia, berdasarkan analisis risiko terhadap sarana produksi dan distribusi yang berada di wilayahnya.

Namun kegiatan rutin ini tidak optimal, apabila pemeriksaan harus dilakukan dengan segera dan mendalam termasuk dengan fokus tertentu. Kegiatan ini dilaksanakan mengingat adanya laporan baik dari masyarakat, Balai Besar/Balai/Loka POM lainnya, lintas sektor maupun on-line. Selain dari pemeriksaan sarana, bentuk lain dari kegiatan ini dapat berupa penelusuran sumber perolehan sarana yang memproduksi dan atau mengedarkan kosmetik ilegal dan tidak memenuhi syarat (TMS), termasuk yang dipromosikan dan diedarkan melalui internet

b. Forum Komunikasi Pemeriksaan Sarana Kosmetik

Forum komunikasi ini diikuti oleh 260 orang inspektur kosmetik yang hadir baik secara daring dan luring dari Direktorat Pengawasan Kosmetik dan UPT Badan POM di seluruh Indonesia. Pada sambutan dan arahannya, Kepala Badan POM Republik Indonesia, Dr. Penny K. Lukito, MCP yang diwakili oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si, menyampaikan momentum pulihnya ekonomi nasional, harus segera disambut dengan upaya percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, maka perlu dilakukan sinergisme dalam kegiatan pengawasan kosmetik yang dilakukan oleh Badan POM yang tidak hanya untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku, namun juga dapat mampu memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha kosmetik dengan keberpihakan terhadap UMKM.

Pada forum komunikasi ini juga terdapat pemaparan materi Upaya Badan POM dalam Mendukung Percepatan Pemulihan Perekonomian Nasional di Bidang Kosmetik oleh Direktur Pengawasan Kosmetik, Drs. Arustiyono, Apt, MPH; Dukungan Pemerintah dalam Percepatan Pemulihan Perekonomian Nasional oleh Plt. Asisten Deputi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dr. Danang Sri Wibowo R; Peran Apoteker dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi



Nasional oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), apt. Noffendri, S.Si; Upaya Peningkatan Kualitas Diri Petugas

dalam Menjalankan Tugas oleh Pakar Komunikasi, Danang Setyo Budi Baskoro, M.Psi; Hasil dan Perencanaan Pengawasan Kosmetik dan Hasil Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Kosmetik oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan Fasilitas Produksi dan Distribusi Kosmetik, Dra. Tita Nursjafrida, Apt, MKM; Hasil Pengawasan Keamanan, Mutu, serta Eksportasi dan Importasi Kosmetik oleh Koordinator Pengawasan Keamanan dan Mutu, serta Ekspor dan Impor Kosmetik, Anto Sujono, S.F, Apt,. M.Sc; serta Hasil Pengawasan Penandaan dan Iklan Kosmetik oleh Koordinator Pengawasan Informasi Produk Kosmetik yang diwakili oleh Mohammad Gama Ramadhan, S.Farm, Apt.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat menjadi wadah peningkatan koordinasi para inspektur kosmetika dalam menyusun strategi pengawasan kosmetika yang efektif dan efisien. Dengan begitu, pengawasan kosmetika yang dilakukan oleh Badan POM dapat berjalan lebih optimal dan mampu mendorong peningkatan peredaran kosmetika yang aman, bermanfaat, dan bermutu, serta memiliki daya saing di pasar nasional dan global.

c. Intensifikasi Pengawasan Promosi Kosmetik di Era Digital

Kemajuan teknologi memicu cepatnya arus informasi, termasuk arus informasi yang tidak bertanggungjawab mengenai kosmetik. Sedangkan sebagian besar masyarakat belum mampu menyaring informasi secara benar. Menyikapi hal tersebut, Badan POM melakukan pengawasan iklan kosmetik yang lebih difokuskan pada media online yaitu marketplace, media sosial dan website serta pada media televisi, agar masyarakat terlindungi dari informasi yang menyesatkan.

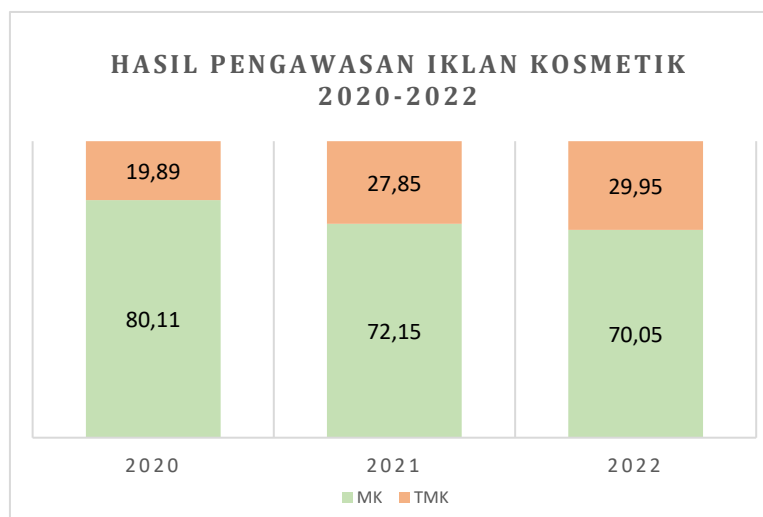
Pengawasan yang dilakukan mempertimbangkan perubahan pola peredaran kosmetik dari media konvensional ke media online yang merupakan dampak dari *digital disruption* termasuk pada sektor rantai distribusi kosmetik. Bahkan dampak terjadinya pandemi COVID-19 yang membatasi interaksi secara langsung, semakin maraknya iklan kosmetik di media online.

Dalam upaya mempertajam pengawasan iklan kosmetika, maka telah terbit Surat Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik nomor B-PW.03.03.4.44.01.22.54 tanggal 18 Januari 2022

perihal Target Pengawasan Iklan Kosmetika 2022. Pengawasan iklan pada tahun 2022 merupakan pengawasan berbasis risiko dengan proporsi pengawasan diprioritaskan di media online. Target jumlah iklan kosmetik yang diawasi pada tahun 2022 sebanyak **20.100** iklan, dengan rincian pengawas iklan di media online sebanyak **50%**, media elektronik sebanyak **20%**, media cetak sebanyak **20%**, dan media luar ruang sebanyak **10%**.

Jumlah tersebut didistribusikan kepada Balai Besar/Balai/Loka POM seluruh Indonesia untuk menjadi target UPT Badan POM dan dihitung kumulatif dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Hasil pengawasan iklan kosmetik yang dilakukan oleh UPT Badan POM dilaporkan secara rutin setiap bulan ke Direktur Pengawasan Kosmetik untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Selain pengawasan pada iklan yang ditargetkan kepada seluruh UPT Badan POM, dilakukan pula pengawasan iklan kosmetik yang sedang *viral* di media *online* serta pengawasan terhadap iklan kosmetik yang berasal dari laporan/pengaduan masyarakat.

Hasil pengawasan promosi kosmetik 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa trend pelanggaran iklan kosmetik semakin meningkat. Iklan kosmetika yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) tahun 2020 sebesar **19,89%**, tahun 2021 sebesar **27,85%** dan tahun 2022 mencapai **29,95%**.



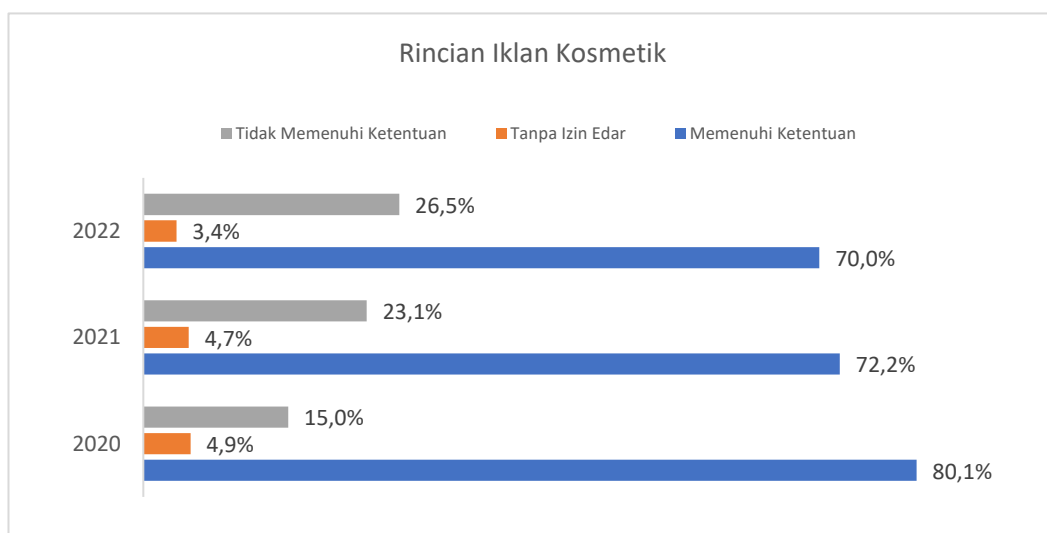
Grafik 6 Hasil Pengawasan Iklan Kosmetik 2020 - 2022

Iklan kosmetik yang diawasi pada tahun 2022 sebanyak 20.583 dari 797 penotifikasi, dengan persentase jumlah iklan kosmetik yang Memenuhi Ketentuan (MK) menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah

pelanggaran iklan yang signifikan sejak tahun 2020 ini sejalan dengan pergeseran target pengawasan media iklan, dari media konvensional ke media online.

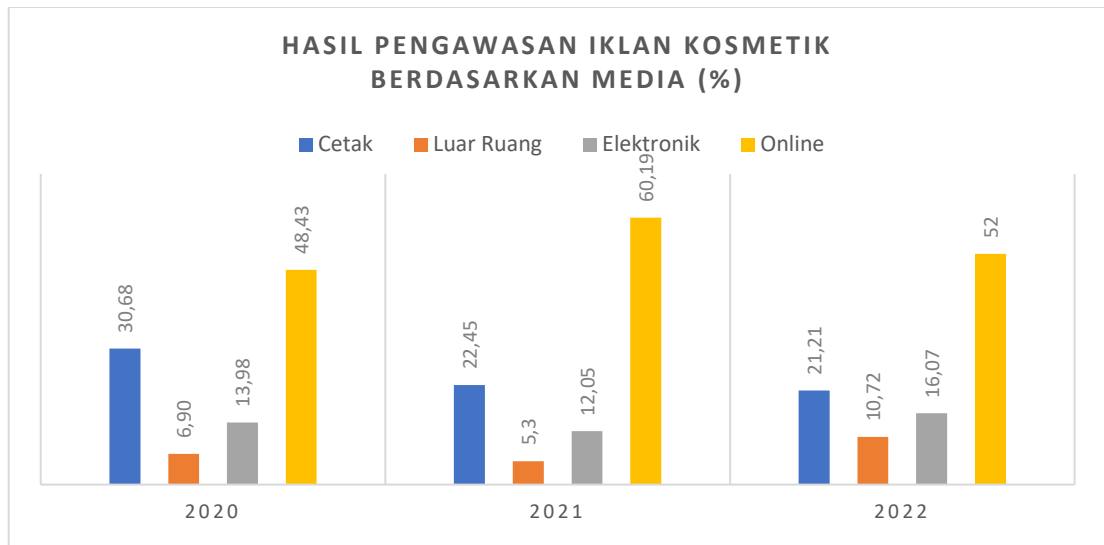
Iklan di media online memiliki jangkauan yang luas, kecepatan dalam menyebarkan iklan yang tinggi, serta kemudahan konsumen dalam mengakses iklan kosmetik di media online. Selain itu, iklan kosmetika di media online banyak didominasi oleh akun perorangan/reseller yang belum terpapar dengan ketentuan periklanan kosmetika. Hal ini mengakibatkan banyaknya pelanggaran iklan kosmetik, sehingga jumlah iklan yang memenuhi ketentuan di media online sangat rendah.

Di samping dengan tidak adanya *pre-market evaluation* pada iklan kosmetik, pembuatan iklan di media online lebih mudah dan lebih ekonomis dibandingkan dengan membuat iklan di media konvensional, maka berpotensi munculnya klaim yang dilarang/klaim yang menyesatkan. Meningkatnya trend maraknya aktivitas beriklan di media digital dan para pelaku usaha yang semakin kreatif dan inovatif dalam berkompetisi memenangkan persaingan pasar namun tidak diimbangi dengan kesadaran untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.



Grafik 7 Rincian Iklan Kosmetik 2020 – 2022

Rincian pelanggaran iklan kosmetik yang ditemukan pada tahun 2022 didominasi oleh iklan yang *overclaimed* (menyesatkan/berlebihan) sebesar 26,51% dan diikuti dengan kosmetik Tanpa Izin Edar sebesar 3,44%.



Grafik 8 Hasil Pengawasan Iklan Kosmetik Berdasarkan Media 2020 – 2022

Dari persentase jumlah iklan yang diawasi per media pada tahun 2022, pengawasan pada media online sebesar 52%, di media cetak sebesar 21,21%, media elektronik sebesar 16,07% dan media luar ruang sebesar 10,72%. Hal tersebut disesuaikan dengan kebiasaan konsumen dalam bertransaksi kosmetik.

Desk Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penandaan dan Iklan Kosmetik

Perubahan gaya hidup, kebutuhan terhadap produk kosmetik semakin meningkat. Informasi mengenai kosmetik dapat diketahui dari penandaan dan iklan kosmetik. Dengan diterapkannya sistem notifikasi kosmetik, penandaan dan iklan kosmetik tidak dilakukan pre-market/pre-evaluation, sehingga sistem pengawasan penandaan dan iklan kosmetik bertumpu pada post market. Hal ini menyebabkan tingginya potensi penandaan dan iklan kosmetik yang Tidak Memenuhi Ketentuan karena kurangnya pengetahuan dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi.

Desk Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penandaan dan Iklan Kosmetik merupakan salah satu upaya Badan POM dalam peningkatan intensifikasi pengawasan kosmetik di peredaran dan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan penandaan dan iklan kosmetik dengan tujuan untuk memberikan fasilitasi kepada pelaku usaha kosmetik dalam percepatan

tindak lanjut yang harus dilakukan oleh pelaku usaha agar penandaan dan iklan kosmetik Memenuhi Ketentuan.

Pada tahun 2022, kegiatan ini diselenggarakan sebanyak 5 (lima) kali yaitu di wilayah Bogor pada tanggal 14 – 15 Maret 2022, di wilayah Depok pada tanggal 14 – 15 Juni 2022, di wilayah Surabaya pada tanggal 8 – 9 September 2022, di wilayah Bandung pada tanggal 24 – 25 November 2022 dan di wilayah Tangerang pada tanggal 23 Desember 2022. Kegiatan desk tindak lanjut ini diikuti oleh 121 pelaku usaha di bidang kosmetik. Diharapkan dengan penyelenggaraan desk tindak lanjut ini menjadi forum diskusi dan interaksi yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pelaku usaha sehingga informasi dan promosi kosmetik yang beredar di masyarakat senantiasa memenuhi ketentuan.





d. Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Regulasi di Bidang Informasi dan Promosi Kosmetik

Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Regulasi di Bidang Informasi dan Promosi Kosmetik merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun. Salah satu pemantik kegiatan ini yaitu informasi pada

penandaan dan iklan kosmetik tidak dilakukan evaluasi *pre-market* melainkan bertumpu pada *post-market*. Dengan diberlakukannya sistem notifikasi kosmetik di ASEAN maka pengawasan penandaan dan iklan kosmetik tidak melalui evaluasi pre market, sehingga pelaku usaha secara mandiri harus mampu memenuhi ketentuan penandaan dan iklan kosmetik. Dari hasil pengawasan kosmetik, pelanggaran penandaan dan iklan kosmetik cenderung dilakukan secara berulang, dengan ketidaksesuaian yang sama, terutama terkait klaim kosmetik. Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan **Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Regulasi di Bidang Informasi dan Promosi Kosmetik**. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan pelaku usaha khususnya dalam pemenuhan ketentuan aspek penandaan dan iklan kosmetik.

Pada tahun 2022, Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Regulasi di Bidang Informasi dan Promosi Kosmetik dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu:

- 1) **Workshop Penerapan QR Code, Logo Halal dan Klaim Kosmetik dalam Pemenuhan Regulasi Penandaan dan Iklan Kosmetik** yang diselenggarakan pada tanggal 30 – 31 Mei 2022 di Semarang. Kegiatan ini dibagi menjadi 2 (dua) agenda kegiatan, yaitu Bimbingan Teknis



Penerapan QR Code, Logo Halal dan Klaim Kosmetik dalam Pemenuhan Regulasi Penandaan dan Iklan Kosmetik pada tanggal 30 Mei 2022 dan Desk Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Penandaan dan Iklan Kosmetik pada tanggal 31 Mei 2022.

Pada hari pertama kegiatan diikuti oleh 53 peserta yang terdiri atas pelaku usaha, asosiasi, dan internal BPOM. Guna meningkatkan pengetahuan

dan kesadaran serta kepatuhan pelaku usaha dalam memproduksi dan/atau mengedarkan kosmetik yang memenuhi ketentuan. Kegiatan ini menghadirkan narasumber yang berkompeten yaitu:

- Direktur Pengawasan Kosmetik (Drs. Arustiyono., Apt., MPH) dengan materi Tren Hasil Pengawasan Kosmetik di Era New Normal;
- Kepala Balai Besar POM di Semarang (Dra. Sandra M.P Linthin, Apt., M.Kes) dengan materi Pengawasan Kosmetik di Wilayah Jawa Tengah;
- Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Dr. H. Mastuki, M.Ag.) dengan materi Pengaturan Logo/Label Halal dan Penerapan QR Code Pada Sertifikat Halal;
- Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan Informasi Produk Kosmetik (Wiwin Widya Prastiwi, S.Si, Apt) dengan materi Pemenuhan Ketentuan Penandaan dan Iklan Kosmetik; dan
- Pimpinan Perusahaan PT Victoria Care Indonesia Tbk (Drs. Rosid Sujono, Apt) dengan materi *Success Story: Membangun Produk Lokal Berdaya Saing dan Tips Tetap “Eksis” di Era New Normal.*

Pada hari kedua dilakukan desk untuk penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan penandaan dan iklan kosmetik, dihadiri oleh 20 perwakilan dari pelaku usaha di bidang kosmetik. Melalui kegiatan ini diharapkan pelaku usaha secara mandiri dapat



mengidentifikasi hal – hal yang perlu dilakukan dalam rangka pemenuhan ketentuan dan regulasi khususnya terkait penandaan dan iklan kosmetik.

2) **Workshop Desain Penandaan dan Iklan Dalam Rangka Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Regulasi di Bidang Informasi dan Promosi Kosmetik** yang diselenggarakan pada tanggal 22 – 23 Juli 2022 di Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari yang dihadiri oleh 45 peserta yang terdiri atas pelaku usaha, asosiasi, dan internal BPOM. Pada kegiatan ini menghadirkan narasumber sebagai berikut:

- Direktur Pengawasan Kosmetik (Drs. Arustiyono., Apt., MPH) dengan materi Tren Hasil Pengawasan Kosmetik di Era New Normal;
- Dosen Program Studi Desain Komunikasi Visual, Institut Seni Indonesia Yogyakarta (Petrus Gogor Bangsa, S.Sn., M.Sn.) dengan materi Desain Komunikasi Visual Dalam Rangka Memenuhi Ketentuan Penandaan Produk Kosmetik;
- Dosen Departemen Ilmu Komunikasi, Fisipol UGM (Syafrizal, S.I.P., M.A) dengan materi Strategi Periklanan yang Jitu;
- Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan Informasi Produk Kosmetik (Wiwin Widya Prastiwi, S.Si, Apt) dengan materi Pemenuhan Ketentuan Informasi dan Promosi Kosmetik;
- Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengawasan Promosi Kosmetik (Hanief Rindhowati, S.Si, Apt) dengan materi Ketentuan Periklanan Kosmetik; dan
- Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengawasan Penandaan Kosmetik (M. Gama Ramadhan, S.Farm, Apt) dengan materi Simulasi Penyusunan Desain Penandaan dan Iklan yang Memenuhi Ketentuan.



Melalui kegiatan ini diharapkan pelaku usaha dapat meningkatkan kreatifitas dalam membuat desain penandaan kosmetik yang menarik dan memberi nilai tambah pad produk kosmetik, serta dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang pengembangan strategi periklanan yang jitu sehingga mampu meningkatkan daya jual produk kosmetik.

3) **Bimbingan Teknis Desain Komunikasi Visual dan Strategi Periklanan Dalam Rangka Memenuhi Ketentuan Penandaan dan Promosi Kosmetik** diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus 2022 di Tangerang. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari dan dihadiri oleh 51 peserta yang terdiri atas pelaku usaha di bidang kosmetik di wilayah Banten, asosiasi, dan internal BPOM. Kegiatan ini menghadirkan narasumber sebagai berikut:

- Direktur Pengawasan Kosmetik (Drs. Arustiyono., Apt., MPH) dengan materi Tantangan dan Peluang Bisnis Kosmetik;
- Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan Informasi Produk Kosmetik (Dra. Tita Nursjafrida, Apt, M.K.M) dengan materi Pemenuhan Ketentuan Penandaan dan Iklan Kosmetik;

- Koordinator Peminatan Desain Grafis DKV Fakultas Seni Rupa Institut Kesenian Jakarta (Rangga Samiaji Rinjani, M.Sn) dengan materi Desain Komunikasi Visual Dalam Rangka Memenuhi Ketentuan Penandaan Produk Kosmetik; dan



- Dosen Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UI (Snezana Swasti Brodjonegoro, S.Sos., M.A.Sc.) dengan materi Strategi Periklanan yang Jitu dan Memenuhi Ketentuan.

Melalui kegiatan ini diharapkan pelaku usaha dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran terkait kosmetik yang memenuhi ketentuan dan meningkatkan kepatuhan dalam memproduksi dan/atau mengedarkan kosmetik yang memenuhi ketentuan.

4) **Cosmetic Intensive Webinar: Boosting Pasar Kosmetikmu Melalui Penandaan dan Iklan yang Baik** yang diselenggarakan pada tanggal 13



Oktober 2022 di Bekasi. Kegiatan ini dilaksanakan secara *hybrid* yang diikuti oleh pelaku usaha di bidang kosmetik, asosiasi, lintas sektor terkait, dan internal BPOM. Jumlah peserta yang hadir secara luring sebanyak

43 orang, melalui *zoom* sebanyak 945 orang, dan melalui *youtube* sebanyak 1.274 orang. Dalam mewujudkan pertumbuhan dunia usaha kosmetik, maka dihadirkan narasumber sebagai berikut:

- Plt. Direktur Pengawasan Kosmetik (Irwan, S.Si, Apt, M.K.M) dengan materi Kebijakan Pengawasan Penandaan dan Iklan Kosmetik;
- Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan Informasi Produk Kosmetik (Dra. Tita Nursjafrida, Apt, M.K.M) dengan materi Ketentuan Penandaan dan Iklan Kosmetik;
- Dosen Program Studi Desain Komunikasi Visual, Institut Seni Indonesiaa Yogyakarta (Petrus Gogor Bangsa, S.Sn., M.Sn.) dengan materi Desain Komunikasi Visual Dalam Rangka Memenuhi Ketentuan Penandaan Produk Kosmetik; dan
- Praktisi Branding (Subiakto Priosoedarsono) dengan materi Strategi Periklanan yang Jitu dan Memenuhi Ketentuan.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang pengembangan pola strategi periklanan yang jitu melalui *branding* produk sehingga mampu meningkatkan nilai dan daya jual produk kosmetik, serta meningkatkan kreatifitas pelaku usaha dalam membuat desain penandaan kosmetik yang menarik dan memberi nilai tambah pada produk kosmetik.

e. Talkshow Urgensi Mitigasi Risiko Pengawasan Kosmetika Kontrak

Talkshow ini diikuti oleh peserta yang berasal dari Asosiasi dan Penanggung Jawab pelaku usaha kosmetik di seluruh Indonesia. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut Direktur Pengawasan Kosmetika Badan POM, Arustiyono, serta Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan Fasilitas Produksi dan Distribusi Kosmetika Badan POM, Tita Nursjafrida. Selain itu, hadir narasumber eksternal dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nova Susanti dan perwakilan Ikatan Notaris Indonesia, Yurisa Martanti.

Melalui Talkshow yang dilaksanakan secara hybrid ini, pelaku usaha kosmetika di Indonesia diharapkan dapat menjawab tantangan dan

persaingan usaha yang semakin ketat dengan meningkatkan inovasi hingga sistem pemasaran produk, sehingga mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Sejalan dengan hal tersebut, pelaku usaha juga harus mampu mengantisipasi setiap risiko yang mungkin terjadi dalam persaingan internal maupun eksternal.



Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito dalam sambutannya mengimbau agar pelaku usaha kosmetika memahami regulasi dan peraturan terkait pengawasan kosmetika kontrak. Hal

ini bertujuan agar pelaku usaha dapat mengidentifikasi risiko permasalahan terkait dengan sengketa merek dan pelanggaran perjanjian kontrak. “Pelaku usaha harus dapat menjalankan usahanya sesuai dengan kaidah produk yang aman, bermutu, dan memberikan manfaat kepada konsumen”, tuturnya.

Oleh karena itu, pembinaan pelaku usaha kosmetika ini menjadi salah satu hal yang akan terus diupayakan Badan POM dalam menekan risiko pelanggaran ketentuan kosmetika oleh pelaku usaha. Hal ini juga didasari dengan penerapan mitigasi risiko di Badan POM, antara lain melalui Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang telah dirasakan manfaatnya terhadap kinerja organisasi. Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat semakin mengoptimalkan kemandirian pelaku usaha dalam negeri dalam memproduksi dan mengedarkan produknya

SK 2**Kualitas pengawasan kosmetik di Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang Optimal**

SK 2. Kualitas pengawasan kosmetik di Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang Optimal

Pada tahun 2022 capaian sasaran kegiatan Kualitas pengawasan kosmetik di Balai Besar/Balai/Loka POM yang optimal adalah sebesar 114.42% capaian tersebut masuk dalam kategori memenuhi ekspektasi. Sasaran kegiatan tersebut didukung oleh 1 indikator kinerja utama yaitu Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM.

IK-3. Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM, indicator ini bertujuan untuk mengukur kesesuaian Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengambilan keputusan hasil pengawasan kosmetik berdasarkan peraturan yang berlaku.

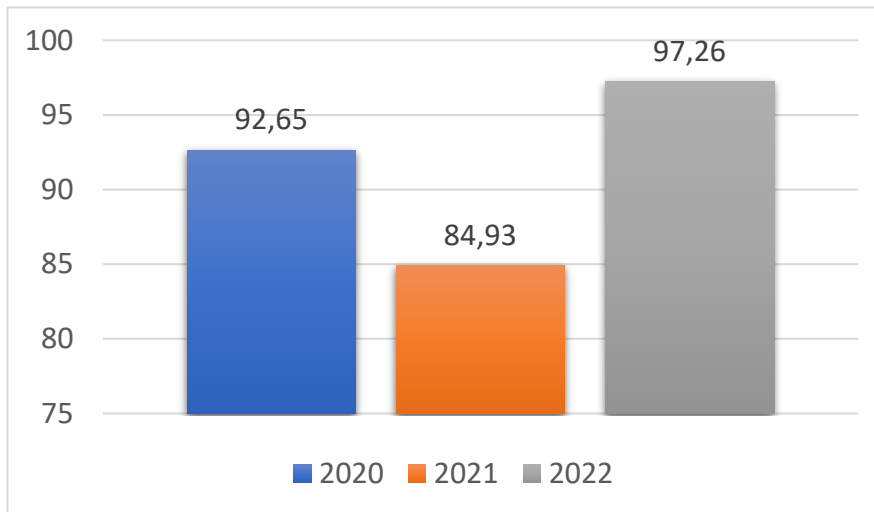
Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2022

Tabel 9 Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	85	97.26	114.42	Memenuhi Ekspektasi

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi IK-3 adalah sebesar 97.26% dengan capaian 114.42%. Capaian tersebut masih telah memenuhi target sehingga masuk dalam kategori Memenuhi Ekspektasi.

Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 9 Perbandingan Realisasi Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dari tahun 2020 – 2022. Pada tahun 2021 mengalami penurunan dikarenakan adanya perubahan DO terkait cara perhitungan sehingga capaian mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2022 capaian indikator ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi hal ini disebabkan karena adanya Supervisi / Pendampingan yang telah dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik kepada UPT terkait Pengawasan Kosmetik.

Perbandingan Realisasi tahun 2022 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Tabel 10 Realisasi tahun 2022 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	87	97.26	111.79	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi IK-3 tahun 2022 telah mencapai target jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra. Namun walaupun telah mencapai target pada akhir tahun renstra masih harus tetap diperlukan upaya perbaikan guna meningkatkan

capaian kinerja yang telah dicapai saat ini dapat dipertahankan dan target pada akhir tahun renstra dapat tercapai.

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022 dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan tersebut adalah sebagai berikut

a. Rapat Koordinasi Pusat dan UPT dalam Manajemen Sampling

Kosmetika merupakan salah satu komoditi yang peredarannya senantiasa diawasi oleh Badan POM. Tujuan pengawasan kosmetika tersebut adalah untuk menjamin produk yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Sampling dan pengujian kosmetika menjadi langkah awal untuk mengetahui apakah produk kosmetika yang beredar di pasaran memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan khasiat.

Strategi dalam pelaksanaan sampling perlu dirumuskan dengan mempertimbangkan kaidah statistik, proporsi sampel (acak dan targeted), metode pengacakan dan cara pengambilan sampel yang benar sehingga akan memberikan hasil yang valid dan representatif untuk mencapai target sasaran indikator Persentase Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat.



Mengingat keterbatasan kemampuan sumber daya yang ada dalam pelaksanaan sampling dan pengujian kosmetika, seperti sarana dan prasarana laboratorium, baku pembanding, metoda analisa, anggaran, Sumber Daya Manusia, dan lain-lain, maka untuk memantapkan

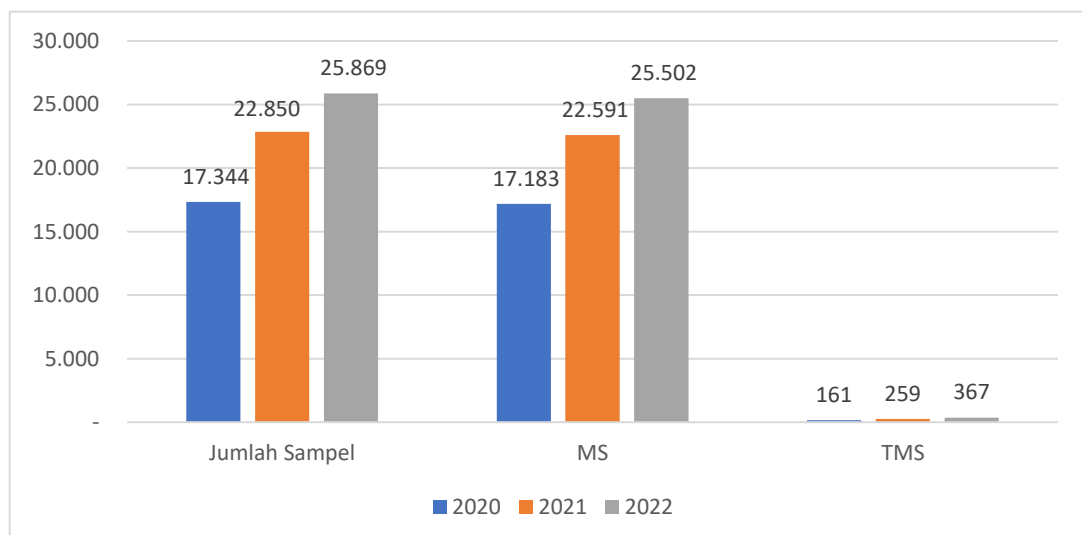
sampling dan pengujian kosmetika agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, Badan POM melaksanakan kegiatan Forum Koordinasi Manajemen Sampling Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara luring dan daring di Tangerang pada tanggal 1 Desember 2022.

Forum Koordinasi tersebut merupakan kegiatan gabungan yang dilaksanakan bersama-sama antara Direktorat Pengawasan di Lingkungan Kedeputan Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Peserta kegiatan terdiri dari seluruh Balai Besar/Balai/ Loka POM dan unit pusat terkait.

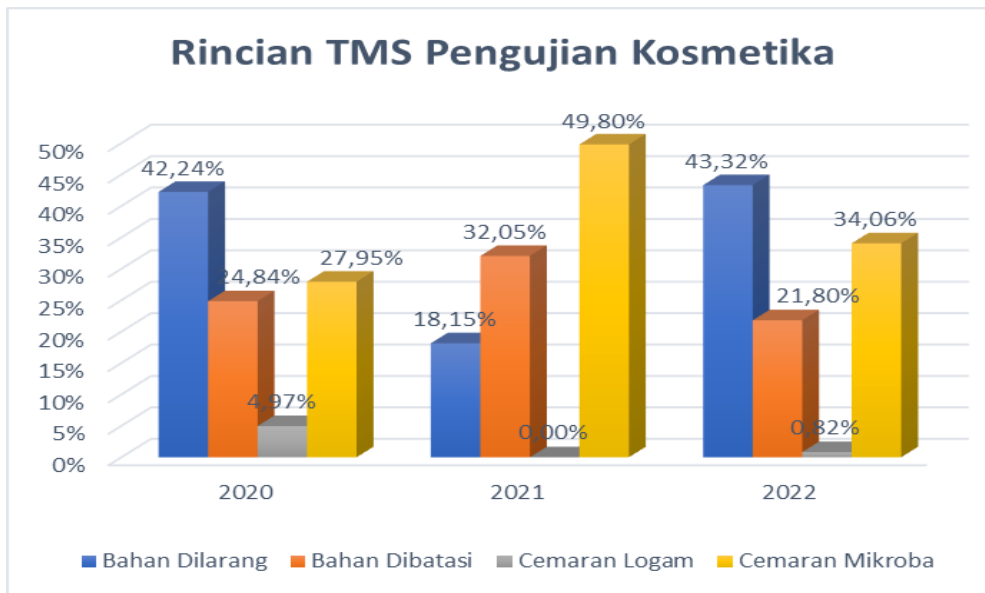
Salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian, mengidentifikasi kendala-kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan sampling dan pengujian serta mencari solusi yang tepat untuk mengatasinya, dengan harapan untuk periode selanjutnya kendala dan permasalahan yang terjadi dapat teratasi yang berdampak pada meningkatnya kinerja pengawasan keamanan dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Terkait pengawasan melalui sampling dan pengujian, maka pada tahun 2022, jumlah sampel Kosmetik ditargetkan sebesar 25.860 sampel dan pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 25.046. Prioritas sampling untuk tahun 2023 masih dialokasikan 30% secara targetted dan 70% secara acak sama seperti tahun sebelumnya. Hal ini menjadikan suatu tantangan tersendiri bagi Badan POM untuk terus aktif melakukan pengawasan produk di peredaran.

Dalam 3 tahun terakhir, hasil sampling dan pengujian kosmetik dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 10 Hasil Pengujian Kosmetik Tahun 2020-2022



Grafik 11 Rincian TMS Pengujian Kosmetik Tahun 2020 – 2022

Pada tahun 2022 telah dilakukan pengujian terhadap 25.869 sampel kosmetik. Dari jumlah sampel diuji tersebut, 25.502 (98,58%) sampel memenuhi syarat dan 367 (1,42%) sampel tidak memenuhi syarat, dengan rincian sampel mengandung bahan dilarang sebesar 159 (0,61%) sampel, mengandung bahan melebihi batas kadar sebesar 80 (0,31%) sampel, mengandung cemaran logam melebihi batas 3 (0,01%) dan mengandung mikroba sebesar 125 (0,48%) sampel

SK 3

Pelayanan Publik di bidang pengawasan kosmetik yang prima

SK 3. Pelayanan Publik di bidang pengawasan kosmetik yang prima

Pada tahun 2022 capaian sasaran kegiatan Pelayanan Publik di bidang pengawasan kosmetik yang prima adalah sebesar 101.01% capaian tersebut masuk dalam kategori memenuhi ekspektasi. Sasaran kegiatan tersebut didukung oleh 1 indikator kinerja utama yaitu Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik.

IK-4. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik, indicator ini bertujuan untuk menilai tingkat efektifitas pelayanan public di bidang pengawasan kosmetik yang dilakukan oleh Direktorat

Pengawasan Kosmetik. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan menggunakan survei kepada para pengguna layanan public di Direktorat Pengawasan Kosmetik. Pelaksanaan / penilaian survei dilakukan oleh Inspektorat.

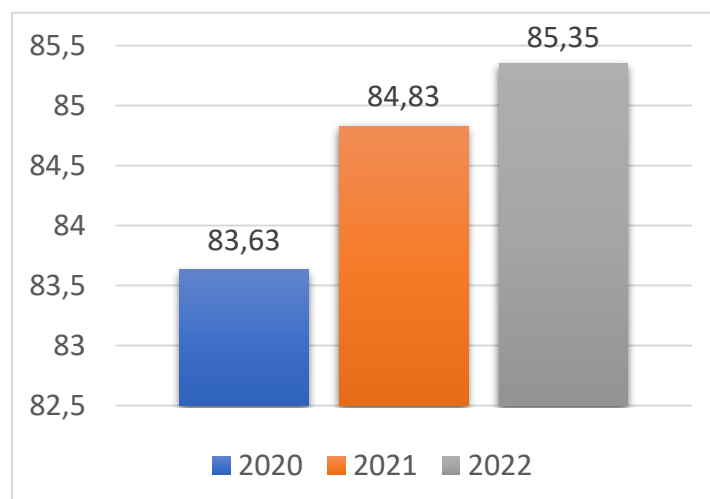
Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2022

Tabel 11 Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	84.5	85.35	101.01	Memenuhi Ekspektasi

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi IK-4 adalah sebesar 85.35% dengan capaian 101.01%. Capaian tersebut telah memenuhi target sehingga masuk dalam kategori Memenuhi Ekspektasi.

Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 12 Perbandingan Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dari tahun 2020 – 2022 terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Perbandingan Realisasi tahun 2022 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Tabel 12 Realisasi tahun 2022 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	85.5	85.35	99.82	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi IK-4 tahun 2022 belum mencapai target jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra. Maka diperlukan upaya perbaikan guna meningkatkan capaian kinerja agar target pada akhir tahun renstra dapat tercapai.

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022 dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan tersebut adalah sebagai berikut

a. Verifikasi Teknis Permohonan SKI pada Sarana Importir Produk Jadi dan Bahan Baku Kosmetika

Penerbitan SKI dilakukan secara online melalui sistem e-bpom.pom.go.id yang tersambung secara langsung dengan sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui INSW (Indonesia National Single Window). Evaluasi permohonan penerbitan SKI dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap persyaratan dan dokumen pendukung yang diunggah oleh importir ke dalam sistem e-bpom. Untuk memastikan bahwa bahan baku/produk jadi kosmetika tersebut digunakan sesuai dengan peruntukkannya dan memastikan dokumen yang diunggah pada saat pengajuan SKI adalah dokumen yang benar, diperlukan verifikasi teknis permohonan SKI pada sarana importir produk jadi/bahan baku kosmetika. Layanan permohonan SKI merupakan salah satu bentuk layanan publik di Direktorat Pengawasan Kosmetik. Meskipun termasuk layanan publik, fungsi pengawasan dalam memberikan layanan SKI tersebut tetap berjalan. Petugas melakukan evaluasi terhadap dokumen permohonan SKI Kosmetika untuk memastikan bahwa bahan baku/produk jadi kosmetika impor yang masuk ke dalam wilayah Indonesia telah terjamin syarat keamanan, manfaat, dan mutunya. Bentuk pelaksanaan verifikasi teknis ini meliputi pelaksanaan kegiatan verifikasi dalam rangka

pemeriksaan terhadap sarana importir kosmetik untuk memastikan produk kosmetik yang beredar telah memenuhi syarat keamanan, manfaat, dan mutu sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Percepatan Pelayanan Publik melalui Desk Konsultasi Pelayanan Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetik dan/atau CAPA Sertifikasi CPKB

Sesuai dengan misi Badan POM, yaitu memfasilitasi percepatan



pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap pelaku usaha UMKM kosmetik, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa, Badan POM selalu berupaya

mendekatkan diri kepada pelaku usaha. Banyak cara telah dilakukan untuk mendukung misi ini, tidak terkecuali upaya Direktorat Pengawasan Kosmetik untuk mempercepat pelayanan publik. Kegiatan yang dirasa efektif untuk mewujudkan keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha UMKM kosmetik adalah dengan secara rutin dan intensif melakukan desk konsultasi dan bimbingan pelayanan publik. Melalui desk konsultasi, pelaku usaha didampingi oleh evaluator Badan POM agar dapat menyediakan persyaratan yang dimintakan untuk memenuhi ketentuan penerbitan perizinan yang diajukan.

Desk konsultasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang diadakan selama tahun 2022 meliputi desk secara luring maupun daring, mencakup pelayanan publik sertifikasi fasilitas produksi dan distribusi kosmetik (persetujuan denah bangunan industri kosmetik, SPA CPKB, sertifikat CPKB, persetujuan fasber),

sertifikasi produk kosmetik (ekspor dan impor kosmetik), pengawasan fasilitas dan produk kosmetik (inspeksi fasilitas produksi dan distribusi kosmetik, pengawasan keamanan dan mutu kosmetik, pengawasan promosi dan informasi kosmetik).



Desk konsultasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang difokuskan pada pelayanan publik sertifikasi CPKB yang diadakan selama tahun 2022 secara luring maupun daring adalah :

- a. Desk Konsultasi Layanan Sertifikasi CPKB, Surat Keterangan Impor dan Tindak Lanjut di Bidang Pengawasan Kosmetik tanggal 14 – 15 Maret 2022 di Hotel Swiss Belinn Bogor;
- b. Desk Konsultasi Pelayanan Sertifikasi CPKB tanggal 18 April 2022 di Hotel Grand Mercure, Jakarta;
- c. Desk CAPA Hasil Audit Sertifikasi CPKB bagi Industri Kosmetik tanggal 27 Mei 2022 di Hotel Borobudur, Jakarta;
- d. Desk Konsultasi Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetik dan Sertifikasi CPKB tanggal 4 - 7 Juli 2022 di Swissbell Hotel, Bogor;
- e. Desk Konsultasi Terpadu Pelayanan Publik dan Pengawasan Kosmetika dalam Rangka Pemenuhan Regulasi tanggal 24 - 25 November 2022 di Hotel Aston, Bandung.
- f. Desk CAPA Hasil Audit Sertifikasi CPKB bagi Industri Kosmetik di Gedung Merah Putih Lt. 7 Badan POM tanggal 19 – 20 September 2022, 3 – 4 Oktober 2022, 8 November 2022, dan 22 – 23 Desember 2022;
- g. Desk CAPA Hasil Audit Sertifikasi CPKB bagi Industri Kosmetik secara online di bulan Februari, September, Oktober, November, dan Desember 2022.

Peserta kegiatan desk ini adalah pelaku industri kosmetik yang sedang melakukan pengajuan persetujuan denah bangunan dan berproses dalam

pemenuhan CAPA atas hasil audit sertifikasi CPKB. Tercatat sekitar 154 industri kosmetik mengikuti kegiatan desk ini.

c. Percepatan Pelayanan Publik dalam upaya Peningkatan Daya Saing melalui Peningkatan Pengetahuan Petugas dan Pelaku Usaha

- Sosialisasi Implementasi Hak Akses OSS RBA Sertifikasi Sarana Kosmetik (daring, 24 Januari 2022)


Sehubungan dengan implementasi Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Badan POM telah melakukan penyesuaian secara sistem dalam hal penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)-nya sehingga semua PB-UMKU di bidang obat dan makanan pada akhirnya dapat diakomodir melalui OSS RBA, tidak terkecuali



perizinan berusaha di bidang kosmetik yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik. Penerbitan PB-UMKU Direktorat Pengawasan Kosmetik melalui sistem OSS RBA

terbagi menjadi dua, yaitu integrasi sistem e-sertifikasi.pom.go.id dengan OSS RBA dan menggunakan hak akses. Adapun PB-UMKU yang menggunakan integrasi sistem e-sertifikasi.pom.go.id dengan OSS RBA telah diakomodir sejak 20 Desember 2021 yaitu PB-UMKU Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetik dan Sertifikat CPKB, dimana untuk prosesnya dilakukan oleh Pusat (Direktorat Pengawasan Kosmetik). Sementara, untuk PB-UMKU lain meliputi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB Secara Bertahap Golongan A, Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB Golongan B, Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi, Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetik Bersama dengan PKRT, dan Perubahan Teknis Sertifikat CPKB telah diakomodir melalui penggunaan hak akses sejak awal Januari 2022.

Melalui pembuatan hak akses turunan oleh BKPM, layanan yang sebelumnya dilakukan secara manual (pengiriman berkas permohonan melalui email) dapat dilakukan secara semi elektronik (melalui oss.go.id). Dari 5 (lima) PB-UMKU dengan mekanisme hak akses, 3 (tiga) diantaranya memerlukan peran serta UPT Badan POM yaitu PB-UMKU Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB Secara Bertahap Golongan A, Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB Golongan B, dan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik. Berkenaan dengan hal tersebut, Direktorat Pengawasan Kosmetik melakukan sosialisasi kepada petugas UPT BPOM yang telah diberikan akun sebagai verifikator dan penyetuju di sistem OSS agar dapat memproses pengajuan PB-UMKU melalui sistem OSS RBA menggunakan hak akses dengan mengundang BKPM sebagai Narasumber.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

Pasal 6 UU Cipta Kerja:
Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:

- penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
- penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
- penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
- penyederhanaan persyaratan investasi.

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7) UU Cipta Kerja:

- Perizinan Berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- Tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi:
 - kegiatan usaha berisiko rendah;
 - kegiatan usaha berisiko menengah; atau
 - kegiatan usaha berisiko tinggi.

Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Sebelum UU CK	Setelah UU CK
Izin Lokasi	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
Izin Lingkungan	Persetujuan Lingkungan
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Lait Fungsi (SLF)	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan KBLI yang ditanam dalam PP 5/2021.
- Pemenuhan persyaratan dan kewajiban didasarkan atas PP Sektor, Perpres, dan Permen/Perban* turunan dari PP 5/2021.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU)

- Sebelumnya (OSS 1.1) dikenal Izin Komersial/Operasional
- Layanan PB UMKU dilakukan seluruhnya melalui Sistem OSS
- PB UMKU sedang dalam proses finalisasi sistem dengan K/L dan sudah terdapat kesepakatan:
 - apabila nomenklatur dan layanan sudah diakomodir dalam Sistem K/L, terlebih dahulu akan dilakukan integrasi sistem, namun
 - apabila belum diakomodir oleh sistem K/L, prioritas segera ditanam dalam sistem OSS.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

*) Berbagai persyaratan diatur dalam 22 Permen/Perban yang harus diakomodir dan ditanam dalam sistem OSS

Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui *zoom meeting*, pada tanggal 24 Januari 2022 yang diikuti oleh seluruh petugas Balai/Loka POM, dengan jumlah peserta mencapai lebih dari 200 peserta. Acara dibuka oleh Direktur Pengawasan Kosmetik, Drs. Arustiyono, Apt., MPH, kemudian dilanjutkan dengan narasumber dari BKPM, Ari Tjahyono, ST terkait Mekanisme Hak Akses pada OSS RBA untuk Penerbitan PB-UMKU Badan POM Khususnya Kosmetik. Setelahnya, dilanjutkan dengan Pemaparan dan Demo terkait Peran UPT BPOM dalam Penerbitan PB-UMKU Badan POM Khususnya Kosmetik melalui Hak Akses pada OSS RBA oleh Koordinator Pengawasan Fasilitas Produksi

dan Distribusi Kosmetik, Dra. Tita Nursjafrida, Apt., MKM beserta tim penilaian sertifikasi CPKB.

- **Pelatihan CPKB Bagi Key Personnel Industri Kosmetik 1-3 Agustus 2022**

Berdasarkan hasil pengawasan *pre-market* oleh Badan POM melalui audit sertifikasi CPKB pada industri kosmetik, masih dijumpai adanya *key*



personnel pada industri kosmetik yang belum pernah mengikuti pelatihan CPKB. Sebagian besar *key personnel* tersebut hanya membaca dan memahami CPKB secara mandiri dari Pedoman CPKB. Pembelajaran terhadap CPKB memang memungkinkan untuk dilakukan secara mandiri oleh personil pada industri kosmetik, namun tingkat pemahaman tiap-tiap personil tersebut terhadap CPKB bisa jadi tidak seragam. Menyikapi kebutuhan tersebut, Badan POM memfasilitasi kegiatan Pelatihan CPKB bagi *Key Personnel* Industri Kosmetik selama 3 hari, yaitu pada tanggal 1 – 3 Agustus 2022 secara *online* /daring.

Pelatihan diikuti oleh sekitar 600 peserta dari kalangan pelaku usaha kosmetik, terutama *key personnel* yang meliputi penanggung jawab teknis, kepala bagian produksi, dan kepala bagian pengawasan mutu di industri kosmetik.

Pada sesi pelatihan disampaikan materi terkait 12 (dua belas) aspek CPKB yang dibawakan oleh narasumber dari internal Badan POM serta tim ahli CPKB Badan POM, yaitu Dra. Widiastuti Adiputra, Apt., Dra. Sri Sayekti Sulisdiarto, Apt., dan Drs. Sumarno, Apt. Di akhir sesi pelatihan, peserta diharuskan untuk mengikuti post test sebagai evaluasi penilaian atas pemahaman peserta akan materi pelatihan. Peserta dengan nilai

post test memenuhi ketentuan kelulusan dinyatakan LULUS dan mendapatkan sertifikat kelulusan pelatihan.



Melalui kegiatan ini, diharapkan *key personnel* industri kosmetik mendapatkan pembelajaran dan pemahaman yang lebih mendalam dan seragam terhadap CPKB,

sehingga dapat melakukan *sharing-knowledge* dan juga *on-the-job training* mengenai penerapan CPKB kepada personil di perusahaan masing-masing.

- **Ngebakso (Ngobrol Bareng Soal Kosmetik) 14 - 16 September 2022**
BPOM terus berupaya dalam memberikan edukasi dan meningkatkan awareness masyarakat termasuk penggunaan dan produksi kosmetika yang baik. Semua orang dapat menjadi pengusaha kosmetika. Munculnya pengusaha-pengusaha kosmetika lokal baru yang akan berdampak langsung dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Salah satu bentuk edukasi yang dilakukan kali ini dengan menyelenggarakan kegiatan webinar series “NGEBAKSO (Ngobrol Bareng Soal Kosmetik)” secara *hybrid*.

Tema ini dipilih karena berdasarkan informasi yang didapatkan dari lapangan, ternyata masih banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa pengusaha kosmetik tidak harus dalam bentuk badan usaha. Oleh karena itu, kegiatan ini didesain untuk dapat menanggulangi persoalan tersebut sehingga memacu munculnya pengusaha-pengusaha kosmetik lokal baru

yang akan berdampak langsung dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia.



Kegiatan Webinar Series “NGEBAKSO” dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dan merupakan rangkaian webinar yang terdiri dari 3 (tiga) seri. Masing-masing serinya akan menyajikan tema berbeda dan berkelanjutan yang bertujuan mendorong munculnya para pelaku usaha kosmetika baru dari seluruh pelosok Indonesia. Series kegiatan “Ngebakso” yang dilaksanakan adalah:

1) Ngebakso Series #1 – Kosmetik Tematik Lebih Dilirik

Kegiatan dilaksanakan secara Hybrid (daring dan luring) pada hari Rabu, 14 September 2022 dan diikuti lebih dari 1000 peserta dari perwakilan lintas sektor, asosiasi, pelaku usaha di bidang kosmetik, *public figure*, dan masyarakat.

2) Ngebakso Series #2 – Jenis-Jenis Pelaku Usaha Kosmetik dan Kemudahan Perizinannya

Kegiatan dilaksanakan secara daring pada hari Kamis, 15 September 2022 dan diikuti oleh 586 peserta dari perwakilan pelaku usaha di bidang kosmetik, petugas Badan POM dan akademisi.

3) Ngebakso Series #3 – Jurus Sakti Menyusun Perjanjian Produksi

Kegiatan dilaksanakan secara daring pada hari Jum’at, 16 September 2022 dan diikuti oleh 435 peserta yang berasal dari pelaku usaha di bidang kosmetik, petugas Badan POM dan akademisi. Materi dalam series ini

disampaikan oleh Kelompok Notaris, Pendengar, Pembaca dan Pemikir dan Direktorat Pengawasan Kosmetik, serta sharing pengalaman dari Industri Kosmetik Penerima Kontrak dan Badan Usaha Pemberi Kontrak

d. Pendampingan UMKM Kosmetik dalam rangka Percepatan Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) secara Bertahap Bimbingan Teknis Sertifikasi Sarana Kosmetik kepada Komunitas Natural Holistic Beauty Community dan Start Up Kosmetik

Industri kosmetik merupakan salah satu usaha yang terbukti mampu bertahan menghadapi situasi dan kondisi yang dinamis dan menantang, tak terkecuali masa pandemi Covid-19. Salah satu indikasinya adalah konsistensi peningkatan jumlah pelaku industri kosmetik, ditunjukkan dengan jumlah perizinan berusaha fasilitas produksi kosmetik berupa sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) yang terus bertambah. Peningkatan ini dapat juga disebabkan oleh banyak bermunculan *start-up* yang mulai memanfaatkan peluang untuk usaha di bidang *natural cosmetics* ataupun industri kosmetik mengubah arah bisnisnya ke *natural cosmetics*.

Dalam rangka mendukung tumbuh dan berkembangnya industri kosmetik di Indonesia, Direktorat Pengawasan Kosmetik, Badan POM berupaya untuk turut berperan mengawal pembuatan kosmetik yang baik sehingga dihasilkan kosmetik yang aman bermutu dan berdaya saing. Sebagai wujud nyata dukungan tersebut, Direktorat Pengawasan Kosmetik menyelenggarakan



kegiatan Bimbingan Teknis Sertifikasi Sarana Kosmetik Kepada Komunitas Indonesia Natural Skincare Society dan *Start-Up* Kosmetik tanggal 8 Juli 2022 di Hotel Santika Premier Bekasi.

Kegiatan ini diikuti oleh 37 peserta dari Natural Holistic Beauty Community dan Start Up Kosmetik. Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Pengawasan Kosmetik mewakili Deputi II, dilanjutkan dengan materi mengenai Kebijakan Pengawasan Kosmetik dalam Mendukung Perkembangan UMKM Kosmetik yang Berdaya Saing oleh Direktur Pengawasan Kosmetik, Perizinan Berusaha di Bidang Sarana Kosmetik oleh Ari Tjahyono, S.T. dari Kementerian Investasi/ BKPM, Tata Cara Sertifikasi Sarana Kosmetik oleh Dra. Tita Nursjafrida, Apt, M.K.M. dari Direktorat Pengawasan Kosmetik dan Tata Cara Notifikasi Kosmetik oleh Yusrina Nur Amalina, S.Farm, Apt dari Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Kegiatan diakhiri dengan Forum Konsultasi.

e. Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam rangka Pengawasan Kosmetika

Pengawasan terhadap Obat dan Makanan yang beredar dianggap lebih efektif apabila mengedepankan pro-active control. Salah satu bentuk konkret dari strategi ini adalah dengan memprioritaskan kegiatan pencegahan dan penangkalan terjadinya pelanggaran di bidang kosmetik. Berkenaan dengan hal tersebut, salah satu kegiatan pencegahan yang dilakukan melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kosmetika memenuhi syarat, agar masyarakat dapat melindungi dirinya dari bahaya penggunaan kosmetik illegal dan atau mengandung bahan berbahaya, dengan fokus pada konsumen yang berisiko tinggi terpapar dan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.



Kegiatan KIE ini dilaksanakan di wilayah Jawa Timur tepatnya di kota Surabaya sebanyak 10 (sepuluh) kali pertemuan, yaitu pada tanggal 5, 9, 25 Maret, 11 April, 25 Mei, 9, 17 Jun, 8 Jul, 4 dan 20 Agustus 2022. Masing-masing pertemuan dihadiri oleh 250 (dua ratus lima puluh) orang peserta. Sebagai narasumber dalam

pertemuan ini adalah Perwakilan dari Direktorat Pengawasan Kosmetik dan Balai Besar POM di Surabaya, serta melibatkan 1 (satu) orang anggota DPR dari Komisi IX, yaitu ibu Dra. Lucy Kurniasri

SK 4

Meningkatnya efektifitas pengawasan kosmetik

SK 4. Meningkatnya efektifitas pengawasan kosmetik

Pada tahun 2022 capaian sasaran kegiatan Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Kosmetik adalah sebesar 103.97% capaian tersebut masuk dalam kategori memenuhi ekspektasi. Sasaran kegiatan tersebut didukung oleh 3 indikator kinerja utama yaitu 1). Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu, 2). Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder, 3). Persentase laporan keamanan kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu.

IK-5. Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu, indikator ini bertujuan untuk mengukur ketepatan waktu terhadap penyelesaian kegiatan tindaklanjut/verifikasi atas hasil pengawasan berdasarkan pedoman yang berlaku.

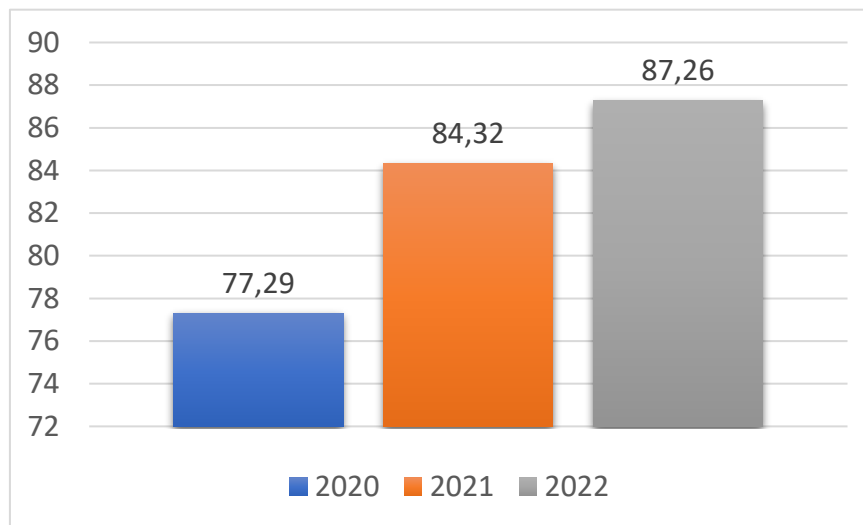
Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2022

Tabel 13 Realisasi Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	87	87.26	100.29	Memenuhi Ekspektasi

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi IK-5 adalah sebesar 87.26% dengan capaian 100.29% dibandingkan dengan target tahun 2022. Capaian tersebut masuk dalam kategori Memenuhi Ekspektasi.

Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 13 Perbandingan Realisasi Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dari tahun 2020 – 2022. Realisasi untuk indikator Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Perbandingan Realisasi tahun 2022 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Tabel 14 Realisasi tahun 2022 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	89	87.26	98.04	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi IK-5 tahun 2022 belum mencapai target jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra. Masih diperlukan upaya perbaikan guna meningkatkan capaian kinerja supaya target pada akhir tahun renstra dapat tercapai.

IK-6. Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder, indikator ini bertujuan untuk mengukur seberapa banyak

tindak lanjut yang telah dilakukan oleh stake holder atas surat tindak lanjut hasil pengawasan yang dikeluarkan.

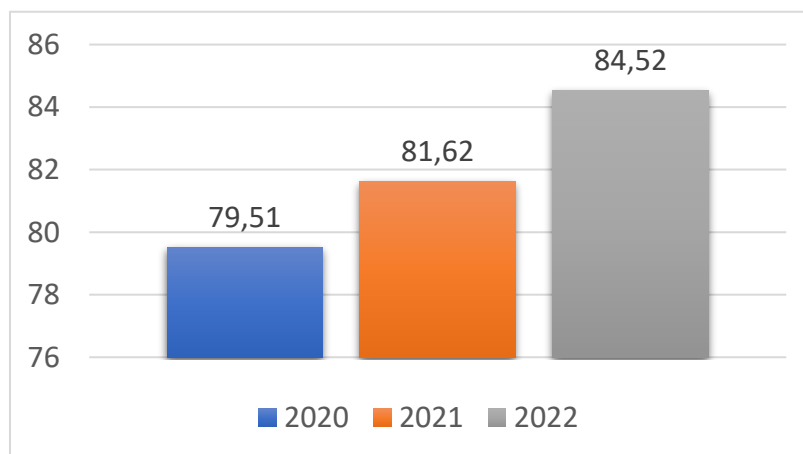
Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2022

Tabel 15 Realisasi Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder	83	84.52	101.83	Memenuhi Ekspektasi

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi IK-6 adalah sebesar 84.52% dengan capaian 101.83% dibandingkan dengan target tahun 2022. Capaian tersebut masuk dalam kategori Memenuhi Ekspektasi.

Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 14 Perbandingan Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data di atas dapat dilihat perbandingan realisasi dari tahun 2020 – 2022. Realisasi untuk indikator Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Perbandingan Realisasi tahun 2022 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Tabel 16 Realisasi tahun 2022 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder	85	84.52	99.44	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi IK-6 tahun 2022 belum mencapai target jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra. Masih diperlukan upaya perbaikan guna meningkatkan capaian kinerja supaya target pada akhir tahun renstra dapat tercapai.

IK-7. Persentase laporan keamanan kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu, indikator ini bertujuan untuk mengukur ketepatan waktu tindaklanjut terhadap laporan keamanan atau laporan efek samping kosmetik yang diterima.

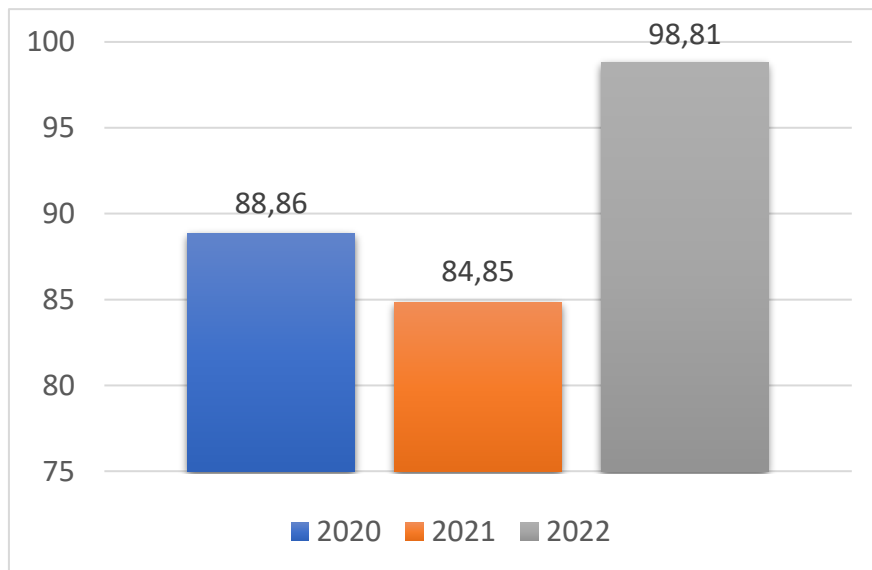
Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2022

Tabel 17 Realisasi Persentase laporan keamanan kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase laporan keamanan kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	90	98.81	109.79	Memenuhi Ekspektasi

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi IK-7 adalah sebesar 98.81% dengan capaian 109.79% dibandingkan dengan target tahun 2022. Capaian tersebut masuk dalam kategori Memenuhi Ekspektasi.

Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 15 Perbandingan Persentase laporan keamanan kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dari tahun 2020 – 2022. Realisasi untuk indikator Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder mengalami penurunan pada tahun 2021 namun kembali mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2022.

Perbandingan Realisasi tahun 2022 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Tabel 18 Realisasi tahun 2022 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase laporan keamanan kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	92	98.81	107.40	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi IK-7 tahun 2022 telah mencapai target jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra. Namun tetap harus diperlukan upaya perbaikan guna mempertahankan capaian kinerja agar target pada akhir tahun renstra dapat tercapai.

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022 dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan meningkatnya efektifitas pengawasan kosmetik adalah sebagai berikut

a. Penguatan Pengawasan Pemasukan Kosmetik Impor Post Border melalui Jejaring Kerjasama Lintas Sektor

Sejak tahun 2018 telah terjadi perubahan mekanisme pemasukan kosmetika impor dari border menjadi post border, dimana kosmetika impor dapat masuk ke dalam wilayah Indonesia tanpa persyaratan SKI pada saat clearance. Hal tersebut membuat pemerintah, khususnya Badan POM harus berupaya secara optimal, untuk mengantisipasi masuknya kosmetika Tanpa Izin Edar (TIE) dan/atau mengandung bahan dilarang/berbahaya. Untuk meningkatkan pengawasan di bidang importasi bahan baku dan produk jadi kosmetika melalui mekanisme post border, dibutuhkan perkuatan Sumber Daya Manusia (SDM) karena pengawasan kosmetika impor yang semakin kompleks akibat adanya mekanisme post border ini.

Dalam rangka mendukung program prioritas Nasional dalam meningkatkan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan, khususnya kosmetik, diperlukan koordinasi aktif antara Badan POM dengan lintas sektor terkait, salah satunya kantor Bea dan Cukai yang memiliki wewenang di bidang kepabeanan agar pengawasan kosmetik impor semakin kuat. Untuk lebih terjalinnya koordinasi antara Badan POM, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM, serta lintas sektor terkait dalam melakukan pengawasan kosmetika post border, sehingga pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan optimal, berkenaan dengan hal tersebut Badan POM khususnya Direktorat Pengawasan Kosmetik melakukan kegiatan:

- a. “Workshop Peningkatan Pengawasan Post Border Kosmetika Impor dengan Petugas Daerah dan Lintas Sektor” di Medan (17-18 Mei 2022), Batam (14-15 Juni 2022) serta Pontianak (20-21 Juli 2022)
- b. Forum Komunikasi Dan Pendampingan Pelaku Usaha Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Post Border Tahun 2022 di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2022



Pada kegiatan Workshop Peningkatan Pengawasan Post Border Kosmetika Impor dengan Petugas Daerah dan Lintas Sektor terdapat pemaparan materi dari lintas sektor terkait seperti Bea dan Cukai, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Badan Pengusahaan Batam. Selain itu, pada kegiatan tersebut juga dilakukan studi banding petugas Badan POM ke daerah pabean wilayah Batam (Pelabuhan Batam Center, Pelabuhan Harbour



Bay dan Kantor Pos Batam Centre) serta wilayah Pontianak (Kantor POS di Pontianak). Kegiatan workshop dan studi banding ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi

antara Badan POM dengan lintas sektor terkait terutama kantor Bea dan Cukai dalam rangka pengawasan pemasukan produk khususnya bahan baku dan produk jadi kosmetika impor.



Penguatan Pengawasan Pemasukan Kosmetik tidak hanya dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor namun juga dengan menindaklanjuti temuan data realisasi impor yang diduga belum memiliki izin SKI dari BPOM. Sepanjang tahun 2021, ditemukan sebanyak 60,03% data realisasi impor dengan HS Code kosmetika dan bahan kosmetika yang diduga belum memiliki izin SKI dari Badan POM. Terkait hal tersebut, Badan POM melakukan tindak lanjut untuk mengetahui penyebab temuan, mencari solusi permasalahan, sekaligus meningkatkan awareness pelaku usaha yang melakukan impor kosmetika dan bahan baku kosmetika melalui Forum Komunikasi dan Pendampingan Pelaku Usaha Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Post Border yang dilaksanakan pada 6 Juli 2022. Melalui forum komunikasi dan pendampingan ini, diharapkan pengawasan post border khususnya terhadap kosmetika dan bahan baku kosmetika dapat berjalan lebih intensif dan meningkatnya awareness pelaku usaha terhadap ketentuan pemasukan kosmetika dan bahan baku kosmetika.

b. Intensifikasi Penelusuran Bahan Berbahaya/ Dilarang dalam Kosmetik

Kosmetik merupakan salah satu produk yang rutin digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tingkat permintaan masyarakat

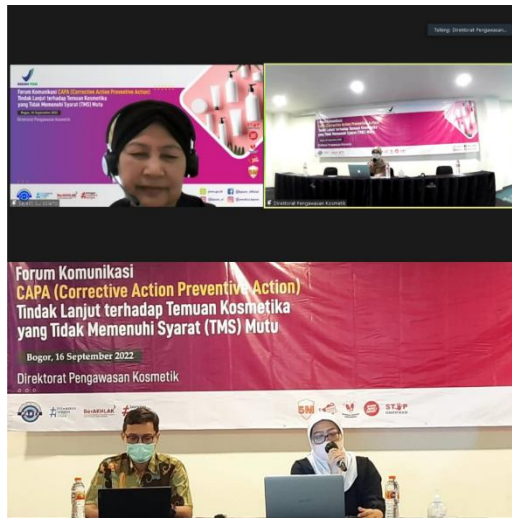


terhadap kosmetika termasuk tinggi. Hal ini menjadi celah bagi oknum-oknum tertentu untuk memalsukan produk kosmetika, atau bahkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang/berbahaya dalam pembuatan kosmetika.

Sesuai dengan visinya, Badan POM selalu berupaya untuk menjamin agar produk yang digunakan masyarakat adalah

produk yang aman, bermutu dan bermanfaat. Salah satu langkah Badan POM dalam mewujudkan misi tersebut adalah dengan melakukan pengawasan

produk di peredaran secara rutin melalui sampling dan pengujian terhadap produk yang beredar di pasaran. Apabila ditemukan produk yang tidak memenuhi persyaratan, akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.



Berdasarkan hasil pengawasan Badan POM, masih banyak ditemukan kosmetika mengandung bahan berbahaya atau dilarang. Mirisnya, produk-produk tersebut masih cukup banyak ditemukan di pasaran,

termasuk di *e-commerce* dengan harga yang murah. Penjualan di *e-commerce* untuk produk-produk ini masih cukup tinggi yang menandakan masih tingginya permintaan terhadap produk tersebut akibat masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan kosmetika yang mereka gunakan. Selain dibutuhkan kesadaran masyarakat, dibutuhkan pula kesadaran dan komitmen para pelaku usaha di bidang kosmetika untuk bisa memberikan jaminan keamanan dan mutu produk kosmetika yang diproduksi dan diedarkan oleh industri ataupun sarana kosmetik.

Dalam rangka mendukung upaya Badan POM dalam melindungi kesehatan masyarakat terhadap penggunaan produk kosmetika mengandung bahan



serta meningkatkan komitmen para pelaku usaha di bidang kosmetika untuk bersama-sama menjamin agar produk kosmetik yang digunakan masyarakat adalah produk yang aman, bermutu dan bermanfaat, Direktorat Pengawasan Kosmetik menyelenggarakan kegiatan Forum Komunikasi Hasil Pengawasan Kosmetika Mengandung Bahan Dilarang/Berbahaya dan Melebihi Batas pada tanggal 24 Mei 2022. dalam kegiatan ini, hadir praktisi

ahli CPKB dan praktisi industri kosmetika serta para pelaku usaha kosmetika dari wilayah Jabodetabek dan sekitarnya.

Selain itu, Direktorat Pengawasan Kosmetik juga menyelenggarakan kegiatan serupa, yaitu Forum Komunikasi CAPA (Corrective Action and Preventive Action) Tindak Lanjut terhadap Temuan Kosmetika yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Mutu pada tanggal 16 September 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha dalam menindaklanjuti temuan produk yang tidak memenuhi syarat (TMS) mutu.

c. Public awareness bahaya kosmetika mengandung bahan berbahaya / dilarang dan penyelenggaraan public warning

Sesuai dengan visinya, Badan POM selalu berupaya untuk menjamin agar produk yang digunakan masyarakat adalah produk yang aman, bermutu dan bermanfaat. Salah satu langkah Badan POM dalam mewujudkan misi tersebut adalah dengan melakukan pengawasan produk di peredaran secara rutin melalui sampling dan pengujian terhadap produk yang beredar di pasaran. Apabila ditemukan produk yang tidak memenuhi persyaratan, akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.



Temuan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya/dilarang akan diinformasikan oleh Badan POM kepada masyarakat melalui Siaran Pers atau *Public Warning*

yang bertujuan untuk menghimbau masyarakat agar tidak menggunakan Kosmetika mengandung bahan berbahaya/dilarang karena dapat berbahaya bagi kesehatan.

Pada tanggal 4 Oktober 2022, Badan POM mengumumkan kepada masyarakat melalui kegiatan Penjelasan Publik 2022 terkait kosmetik mengandung bahan berbahaya/dilarang sebanyak 16 (enam belas) item.

Produk - produk tersebut merupakan hasil temuan di peredaran (*post-market control*) secara rutin, kasus, maupun operasi penertiban ke sarana produksi, sarana distribusi, atau retail oleh Badan POM melalui 73 (tujuh puluh tiga) unit pelaksana teknis Badan POM di seluruh Indonesia. Temuan kosmetika mengandung bahan berbahaya/bahan dilarang didominasi oleh pewarna yang dilarang, yaitu Merah K3, Merah K10, dan Sudan III yang berisiko menyebabkan kanker (bersifat karsinogenik), serta menimbulkan gangguan fungsi hati dan bahkan kanker hati.

Sebagai bentuk implementasi kerjasama dengan beberapa otoritas pengawas obat dan makanan negara lain, Badan POM juga menerima laporan adanya peredaran kosmetika mengandung bahan dilarang / bahan berbahaya di negara tersebut yang disampaikan melalui laporan PMAS (*Post-Marketing Alert System*). Sesuai laporan tersebut tercatat sebanyak 46 (empat puluh enam) item kosmetika mengandung bahan dilarang / bahan berbahaya yang dilaporkan oleh beberapa negara, yaitu Thailand, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura. Seluruh temuan PMAS tersebut merupakan produk yang tidak terdaftar di Badan POM

d. Pembentukan Agent of Change dalam Pelaporan Efek Samping Kosmetik

Peredaran kosmetik yang semakin marak seiring dengan perkembangan di bidang teknologi dan farmasi yang memunculkan berbagai produk inovasi baru, menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh Badan POM saat ini. Meningkatnya pemakaian kosmetika juga tidak lepas dari kemajuan teknologi informasi sehingga memungkinkan gencarnya promosi kosmetika baik melalui media cetak maupun elektronik yang pada umumnya sangat menjanjikan. Meskipun kosmetika dapat membantu seseorang tampak lebih cantik dan tampil lebih menarik, namun dapat juga menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Sebagai akibat dari meluasnya pemakaian kosmetika maka kemungkinan terjadinya kejadian efek samping kosmetika juga dapat meningkat.

Pemantauan terhadap efek samping kosmetika menjadi penting mengingat kosmetika sudah menjadi kebutuhan semua orang, mulai dari bayi, remaja,

dewasa, lanjut usia, pria maupun wanita. Efek yang ditimbulkan dari penggunaan kosmetika pada setiap orang tidaklah sama. Efek samping kosmetika walaupun ringan dan jarang terjadi namun dapat menimbulkan efek samping yang serius, serta sering menimbulkan ketidaknyamanan bagi pemakainya.

Berdasarkan data laporan efek samping kosmetika yang diterima dari tenaga kesehatan dan masyarakat masih minim, sehingga diperlukan suatu upaya yang lebih optimal dari pihak berwenang, dalam hal ini Badan POM, untuk mengedukasi masyarakat dan tenaga kesehatan sehingga dapat berperan lebih aktif dalam melakukan pelaporan efek samping kosmetika. Pelaporan tersebut selanjutnya dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Sejak tahun 2017 – 2021 telah dilakukan kegiatan pembentukan jejaring lintas sektor dalam rangka pelaporan efek samping kosmetika dan ditunjuk *person in charge* (PIC) dari Dinas Kesehatan Propinsi, rumah sakit, maupun UPT Badan POM yang ada di Sumatera Barat, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, DI Yogyakarta, Banten, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta.

Kegiatan *Training Of Trainer* (ToT) Petugas Penanggungjawab Pelaporan Monitoring Efek Samping Kosmetika dilaksanakan di Bogor pada tanggal 2 - 3 Juni 2022 secara hybrid. Kegiatan mengundang seluruh PIC yang ditunjuk dari Dinas Kesehatan Propinsi, rumah sakit, maupun UPT Badan POM yang ada di Sumatera Barat, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, DI Yogyakarta, Banten, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta. Dalam kegiatan tersebut dipaparkan materi tentang Kebijakan Pengawasan Kosmetik, Pengawasan Keamanan Kosmetika dan Monitoring dan Pelaporan Efek Samping Kosmetika, Pengawasan Keamanan Kosmetika dan Monitoring dan Pelaporan Efek Samping Kosmetika Niacinamid dan pembahasan studi kasus laporan efek samping kosmetik.

Kosmetika yang beredar di masyarakat, masih dapat dimungkinkan menyebabkan efek samping. Efek samping yang terjadi wajib dilaporkan oleh pelaku usaha pemilik nomor izin edar / notifikasi produk kosmetik. Dapat juga dilaporkan oleh tenaga Kesehatan dan masyarakat langsung. Aplikasi



pelaporan efek samping kosmetik sudah dirancang dan dibuat pada tahun 2019. Aplikasi pelaporan tersebut dengan nama laporeskos.pom.go.id (website) atau ESKOS-BPPOM (playstore). Aplikasi tersebut merupakan media pelaporan yang lebih update dibandingkan cara pelaporan sebelumnya menggunakan form pelaporan secara manual. Sejalannya waktu, ditemukan beberapa kendala dalam penerapan aplikasi tersebut. Pada tahun 2022 dilakukan pengembangan aplikasi. Pengembangan yang dilakukan meliputi perbaikan untuk kemudahan pendaftar mendapatkan akses pada saat pembuatan akun dan login ke aplikasi, penambahan fitur lupa password, dan merubah format pelaporan untuk meminimalkan kejadian laporan tidak terkirim

e. Farmakovigilans bagi Pelaku Usaha

Forum Komunikasi Peningkatan Awareness Pelaku Usaha Kosmetika dalam Pelaporan Efek Samping Kosmetika Mengandung Pewarna Rambut dan Pelaporan Distribusi Kosmetika Mengandung Alpha Hydroxy Acid (AHA) dalam rangka Farmakovigilans Bagi Pelaku Usaha

Maraknya industri e-commerce dan media sosial sebagai saluran jual beli kosmetika secara langsung kepada konsumen, telah memberikan banyak keuntungan juga kemudahan bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan produk kecantikannya. Beragam produk kosmetika yang ditawarkan secara online, dengan harga murah dan merek terkenal menyebabkan konsumen

kurang waspada dengan produk kosmetika yang ilegal dan/atau mengandung bahan berbahaya/bahan dilarang, yang tidak jarang menimbulkan efek samping bagi penggunanya.



Berbagai macam formulasi kosmetika pencerah kulit ditawarkan oleh pelaku usaha melalui produk-produk unggulannya. Kosmetika dengan tujuan pencerah kulit dapat menggunakan bahan Alpha Hydroxy Acid (AHA) yang pada umumnya digunakan sebagai pelembab, exfoliant dan chemical peeling. Namun penggunaan AHA dalam Kosmetika yang tidak tepat dan berlebihan dapat menimbulkan efek yang membahayakan kesehatan kulit.

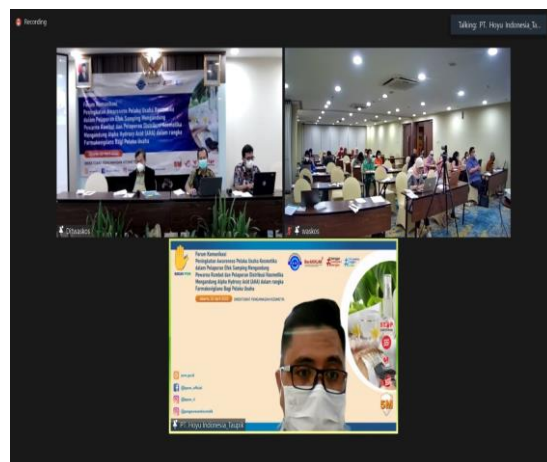
Dunia fashion yang berkembang pesat dewasa ini, tidak hanya pada model pakaian yang direlease setiap tahunnya, rambut pun menjadi obyek fashion. Pewarnaan rambut atau pengecatan rambut adalah sebuah praktik mengubah warna rambut. Alasan utamanya adalah untuk kecantikan, untuk menutup rambut uban atau putih, untuk mengubah warna yang dianggap yang lebih diinginkan atau bermode, atau untuk mengembalikan warna rambut asli setelah luntur karena proses penataan rambut atau pengaruh sinar matahari. Para remaja perlu mencermati resiko mewarnai rambut karena penggunaan pewarna rambut memungkinkan timbulnya reaksi alergi.

Badan POM menjalankan perannya dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan melalui pengawasan pre-market dan post-market. Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen terhadap mutu, khasiat dan keamanan produk maka pemerintah juga melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi.

Pengawasan kosmetika tidak hanya menjadi tanggung jawab Badan POM sebagai regulator. Pelaku usaha kosmetika juga harus memiliki komitmen “sharing responsibility” dalam menjamin produk yang dihasilkan dan atau diedarkan senantiasa memenuhi keamanan, mutu dan kemanfaatan. Dalam rangka meningkatkan awareness pelaku usaha dalam melakukan monitoring dan melaporkan kejadian efek samping kosmetika, Direktorat

Pengawasan Kosmetik pada tanggal 22 April 2022 di Jakarta telah menyelenggarakan kegiatan “Forum Komunikasi Peningkatan Awareness Pelaku Usaha Kosmetika dalam Pelaporan Efek Samping Kosmetika Mengandung Pewarna Rambut dan Pelaporan Distribusi Kosmetika Mengandung Alpha Hydroxy Acid (AHA) dalam rangka Farmakovigilans Bagi Pelaku Usaha”.

Kegiatan dibuka oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si secara daring. Dalam sambutan dan paparan Ibu Deputy menyampaikan bahwa, sesuai dengan Peraturan Badan POM No 30 tahun 2020



tentang Persyaratan Teknis Penandaan kosmetik, Pemilik Nomor Notifikasi Kosmetika wajib melaporkan distribusi Kosmetika sediaan kulit mengandung Alpha Hydroxy Acid (AHA) kelompok 2 dan kelompok 3 secara berkala (triwulan) pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober serta melakukan monitoring dan pelaporan efek samping yang timbul akibat penggunaan kosmetika, sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Badan POM No. 26 Tahun 2019.

Dalam kegiatan ini terdapat beberapa paparan materi narasumber dari Direktur Pengawasan Kosmetik, Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan Keamanan dan Mutu, serta Ekspor dan Impor Kosmetik, Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin (dr. Roro Inge Ade Krisanti, Sp.KK(K), Subkoordinator Substansi Pengawasan Kosmetik, dengan topik terkait Kebijakan Pengawasan Kosmetik, Pengawasan Keamanan Kosmetik, Tinjauan Ilmiah Efek Samping Kosmetik mengandung Pewarna Rambut dan Kosmetik Mengandung AHA, Tatacara Pelaporan Efek Samping Kosmetik mengandung Pewarna Rambut dan Pelaporan Distribusi Kosmetik Mengandung AHA.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Badan POM khususnya Direktorat Pengawasan Kosmetik dapat Meningkatkan awareness pelaku usaha dalam

melakukan monitoring dan melaporkan kejadian efek samping kosmetika mengandung pewarna rambut dan pelaporan distribusi kosmetika mengandung Alpha Hydroxy Acid (AHA), melalui aplikasi e-reporting pelaporan efek samping kosmetika.

FORUM KOMUNIKASI TEKNIS BADAN POM DAN CONTENT CREATOR KOSMETIKA

Kosmetika saat ini merupakan komoditas yang digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai kalangan usia, baik perempuan maupun laki-laki. Penggunaan kosmetika yang semakin luas ini meningkatkan permintaan dan kebutuhan konsumen terhadap produk kosmetika. Industri kosmetika saat ini semakin berkembang pesat seiring dengan berkembangnya era digital. Adanya perubahan pola peredaran kosmetika yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, kini semakin mudah dan berkembang dilakukan secara online. Dengan kondisi tersebut, dunia usaha kosmetik diproyeksikan akan terus tumbuh terutama seiring dengan pandemi berangsur usai dan akan tetap berkembang setiap tahunnya.



Perkembangan dunia digital juga memberikan kontribusi pada semakin berkembangnya pasar kosmetika di Indonesia. Hal ini sejalan juga dengan semakin berkembangnya fenomena review produk kosmetika yang dilakukan oleh content creator, beauty advisor, beauty blogger,

ataupun reviewer melalui akun pribadi media sosialnya secara mandiri atau personal. Konten review produk kosmetika berupa foto, video, podcast, tulisan/blog, digital art, dan lainnya saat ini semakin kreatif dan menarik sehingga masyarakat lebih mudah menerima informasi terkait review produk kosmetika yang akan digunakan. Konten tersebut dibagikan melalui media sosial seperti YouTube, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, atau blog. Fenomena ini memberikan peluang kepada para content creator untuk

berlomba-lomba membuat konten review produk kosmetika. Namun, dengan maraknya konten review produk kosmetika oleh content creator, dapat berpotensi menimbulkan review suatu produk kosmetika yang tidak sesuai ketentuan.

Berkaitan dengan hal tersebut, BPOM hadir untuk menjawab tantangan tersebut melalui kegiatan pada hari ini “Forum Komunikasi Teknis Badan POM dan Content Creator” dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan dengan sharing informasi antara BPOM dengan conten creator demi tercapainya perlindungan



bagi masyarakat terhadap kosmetika serta konten review yang memenuhi ketentuan. Kegiatan ini diawali dengan pembukaan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Reri Indriani. Dalam pembukaan disampaikan bahwa tantangan pengawasan peredaran kosmetika secara online semakin besar sehingga peran content creator sangat besar terutama dalam mereview atau memberikan informasi yang tepat, agar masyarakat terlindungi dari penggunaan kosmetika ilegal atau membahayakan kesehatan. Pada sambutan tersebut juga disampaikan dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Badan POM agar dapat memperkuat pengawasan kosmetika di peredaran. Pada kesempatan ini Plt. Direktur Pengawasan Kosmetik, Irwan menyampaikan paparan terkait Pengawasan yang telah Dilakukan BPOM terhadap Peredaran Kosmetika Online dan Tantangannya serta Hal-hal yang harus Diperhatikan Conten Creator pada Review Kosmetik sebagai pengantar diskusi yang akan dilaksanakan bersama dengan para narasumber.

Pada kegiatan ini, Direktorat Pengawasan Kosmetik turut mengundang tiga narasumber dari berbagai latar belakang. dr. Grand Lich yang merupakan dokter sekaligus content creator yang menyampaikan terkait kondisi content

kosmetika di media sosial saat ini. Narasumber selanjutnya adalah dr. Fitria Agustina, Sp.KK, FINSDV, FAADV merupakan praktisi kesehatan yang menyampaikan awareness dan risiko dalam mempromosikan produk kosmetika. Selain kedua narasumber tersebut, pada kegiatan ini turut mengundang praktisi hukum Alfin Frans Hamonangan, S.H. yang menyampaikan materi terkait Tinjauan Hukum, Tindak Lanjut dan Sanksi terhadap Pelaku Peredaran Kosmetika Ilegal dan Mengandung Bahan Berbahaya/Dilarang. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan dampak yang berkelanjutan bagi proses review kosmetika oleh content creator dalam meningkatkan awareness masyarakat.

f. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Kosmetik

Webinar Series: "Stop Kosmetik Bermerkuri, Cantik Sehat Tanpa Merkuri"

Kegiatan Webinar Series: STOP Kosmetik Bermerkuri sesi 4 ini dilaksanakan pada 11 Agustus 2022 di Makassar dengan tema Cantik Sehat Tanpa Merkuri. Kegiatan ini dilaksanakan karena masih banyaknya kosmetik mengandung



merkuri yang ditemukan di peredaran dan besarnya permintaan masyarakat terhadap kosmetik dengan efek memutihkan kulit secara instan. Selain itu pemahaman masyarakat mengenai risiko yang diperoleh jika menggunakan kosmetik yang mempunyai efek

memutihkan kulit secara instan masih rendah serta sebagai implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN PPM).

Kegiatan ini melibatkan beberapa lintas sektor (Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Makassar, PD IAI Sulawesi Makassar, IDI Cabang Makassar, PERDOSKI Cabang Makassar, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kota Makassar); asosiasi/komunitas, pelaku usaha; generasi millennial (pelajar/mahasiswa); serta Putri Indonesia Sulawesi Selatan.

Acara ini dibuka oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang menjelaskan bahwa masih banyaknya peredaran kosmetik berbahan merkuri yang disebabkan karena tingginya permintaan masyarakat terhadap kosmetik yang memiliki efek memutihkan kulit secara instan dan minimnya pengetahuan terkait efek dari kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.

Kegiatan webinar ini adalah salah satu bentuk Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan



kewaspadaan dan pengetahuan masyarakat dalam memilih dan menggunakan produk kosmetika secara cerdas; memberdayakan masyarakat dalam upaya melindungi diri dari bahaya penggunaan kosmetika berMerkuri dan/ atau mengandung bahan berbahaya; dan mengurangi permintaan masyarakat terhadap kosmetik berMerkuri.

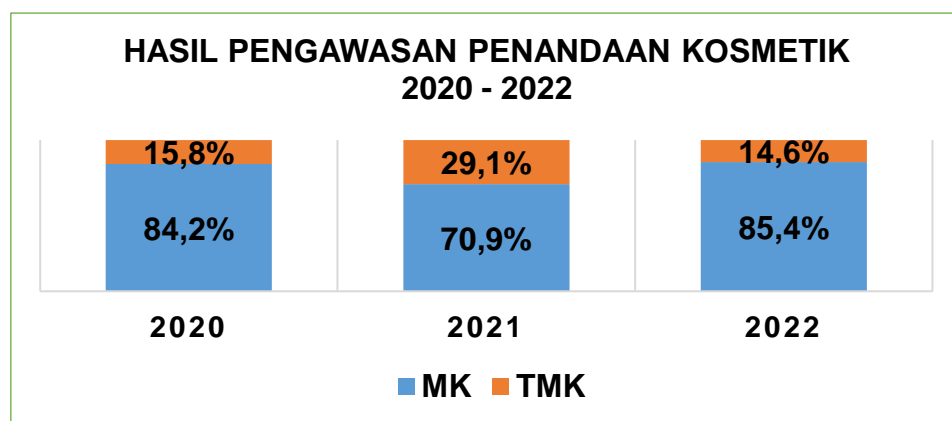
g. Intensifikasi Pengawasan Post Market Penandaan Kosmetik

Salah satu *bussiness process* utama yang dilakukan oleh Badan POM adalah pengawasan terhadap informasi pada penandaan kosmetik yang didasarkan pada ketentuan yang berlaku. Dengan diberlakukannya sistem notifikasi kosmetik di ASEAN memberikan konsekuensi salah satunya yaitu tidak dilakukannya evaluasi *pre market* terhadap informasi pada penandaan kosmetik. Pada sistem notifikasi lebih dititikberatkan pada tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk kosmetik yang dimilikinya. Namun demikian informasi kosmetik sendiri tidak ada evaluasi *pre market*, sehingga

memenuhi terhadap ketentuan yang berlaku banyak ditumpukan pada kemandirian pelaku usaha.

Pengawasan penandaan dilakukan oleh petugas Balai Besar/Balai/ Loka POM di seluruh Indonesia terhadap kosmetik yang disampling dan dilaporkan setiap bulannya kepada Direktorat Pengawasan Kosmetik. Sesuai Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik Nomor HK.02.02.4.43.05.22.28 Tahun 2022 tentang Perubahan Teknis Perencanaan Dan Pelaksanaan Sampling Dan Pengujian Obat Tradisional. Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik, terhadap Kosmetik yang disampling terlebih dahulu dilakukan evaluasi terhadap penandaan sebanyak 100% dari total sampel (tidak termasuk item sampel berulang). Jumlah evaluasi penandaan (MK dan TMK), beserta hasil evaluasi penandaan Kosmetik yang TMK dilaporkan ke Kedeputusan untuk selanjutnya dilakukan pengujian mutu dan keamanannya.

Hasil pengawasan penandaan yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia dalam kurun waktu 2020 – 2022 adalah sebagai berikut:

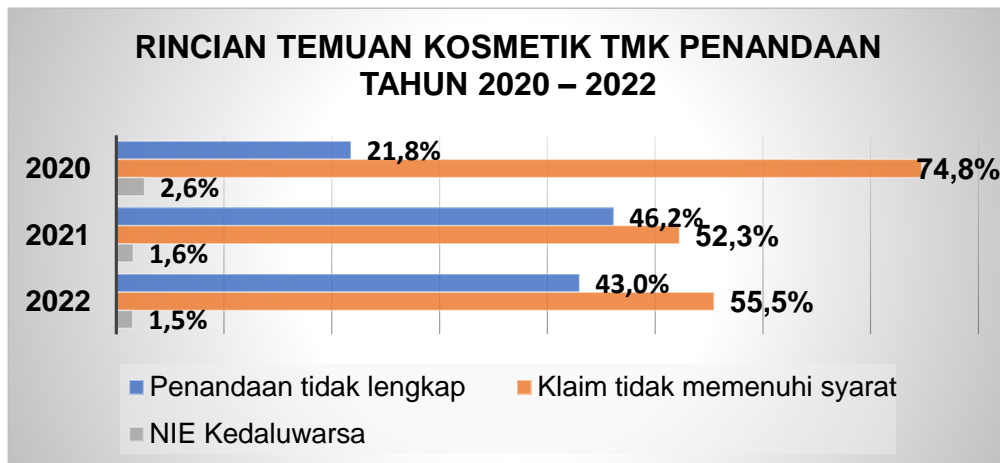


Grafik 16 Hasil Pengawasan Penandaan Kosmetik Tahun 2020 -2022

Hasil pengawasan penandaan kosmetik dalam 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif dimana terjadi penurunan penandaan kosmetik tidak memenuhi ketentuan (TMK) pada tahun 2022 namun terlihat peningkatan pada tahun 2021. Hal ini dapat disebabkan oleh meningkatnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha terhadap pemenuhan persyaratan penandaan sekaligus menunjukkan keberhasilan upaya Badan POM dalam

membina dan mendampingi pelaku usaha agar dapat membuat desain penandaan kosmetik yang memenuhi ketentuan.

Temuan penandaan TMK karena mencantumkan klaim tidak memenuhi syarat/ menyesatkan masih menjadi temuan terbesar pada tahun 2020 – 2022, sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 17 Rincian Temuan Kosmetik TMK Penandaan Tahun 2020 - 2021

Klaim pada penandaan kosmetik merupakan salah satu *selling point* dari produk yang dijual oleh pelaku usaha. Hal ini menyebabkan pelaku usaha sering tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku agar dapat menarik perhatian konsumen. Selain itu, pemenuhan atas data dukung dari klaim yang dicantumkan pada penandaan kosmetik perlu menjadi perhatian khusus. Pencantuman klaim-klaim keamanan maupun efikasi yang tidak didukung data uji atau literatur yang cukup menjadi temuan kosmetik TMK penandaan meskipun klaim tersebut bukan merupakan klaim yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan.

Selain klaim kosmetik, kelengkapan persyaratan penandaan kosmetik menjadi tantangan dalam pengawasan penandaan kosmetik. Kesadaran pelaku usaha terkait regulasi persyaratan teknis penandaan kosmetik perlu terus ditingkatkan. Intervensi Badan POM dalam wujud bimbingan teknis maupun pendampingan terus dilakukan agar pelaku usaha dapat memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku terkait penandaan kosmetik. Intervensi Badan POM dalam wujud bimbingan teknis maupun pendampingan perlu terus dilakukan agar pelaku usaha dapat memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku terkait penandaan kosmetik

h. Forum Komunikasi Pengawasan Post Market Penandaan dan Promosi Kosmetik Pusat dan Daerah

Pada sistem notifikasi kosmetik tidak terdapat persetujuan penandaan dan iklan kosmetik (tidak ada pengawasan pre-market) saat pelaku usaha melakukan notifikasi produk kosmetik. Hal ini menyebabkan pengawasan penandaan dan iklan kosmetik ditekankan kepada pengawasan saat produk beredar di pasaran (pengawasan post-market). Dengan demikian, petugas bagian pemeriksaan di UPT Badan POM di seluruh Indonesia harus mengevaluasi penandaan dan iklan kosmetik yang beredar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa ada contoh penandaan dan iklan yang sudah disetujui sebelumnya saat proses notifikasi produk kosmetik.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penandaan dan iklan kosmetik, diperlukan persamaan persepsi antara petugas pusat dan daerah sehingga menghasilkan keputusan hasil pengawasan yang tepat. Mengingat tidak adanya evaluasi pre-market penandaan dan iklan kosmetik, maka dapat berpotensi menimbulkan perbedaan keputusan hasil pengawasan.

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kemandirian petugas Balai Besar/ Balai/ Loka POM dalam melakukan pengawasan penandaan dan iklan kosmetik, maka dilakukan kegiatan Forum Komunikasi Pengawasan Post Market Penandaan dan Promosi Kosmetik Pusat dan Daerah dalam bentuk asistensi kepada UPT BPOM. Adapun UPT BPOM yang menjadi target asistensi pengawasan penandaan dan iklan kosmetik merupakan UPT yang berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya memiliki gap yang cukup besar pada hasil keputusan pengawasan penandaan dan iklan kosmetik antara Pusat dengan Daerah.

Pada tahun 2022, kegiatan asistensi dalam rangka Peningkatan Pengawasan Penandaan dan iklan Kosmetik dilakukan pada UPT BPOM sebagai berikut:

- 1) Balai Besar POM di Pontianak dan Loka POM di Sanggau pada tanggal 17 Februari 2022



2) Balai Besar POM di Samarinda dan Loka POM di Balikpapan pada tanggal 27 dan 28 Juni 2022



3) Balai Besar POM di Palembang dan Loka POM di Lubuk Linggau pada tanggal 12 Juli 2022



Selain kegiatan asistensi yang dilakukan secara *on site* di kantor UPT Badan POM, pada tanggal 1 November 2022 dilakukan Kegiatan Evaluasi Triwulan Pengawasan Penandaan dan Iklan Kosmetik secara daring yang dihadiri oleh perwakilan petugas seluruh UPT Badan POM. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas secara teknis monitoring dan evaluasi pelaporan hasil pengawasan penandaan dan iklan kosmetik yang dilakukan oleh UPT BPOM di seluruh Indonesia.



i. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Pengawasan Promosi Kosmetik di Era Revolusi Industri 4.0

Kondisi pandemi saat ini terus menunjukkan perbaikan, diantaranya pemulihan sektor perekonomian pada tahun 2022. Di sisi lain, perkembangan era digitalisasi juga mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat terutama komoditi kosmetik, sehingga peredaran kosmetik secara online semakin meningkat. Menyikapi hal tersebut, Badan POM sebagai bagian dari pemerintah turut berupaya mendukung pemulihan sektor perekonomian dan juga meningkatkan pengawasan iklan kosmetik di media online dengan memperkuat koordinasi lintas sektor terkait peredaran kosmerik online.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan kegiatan **“Pendampingan Bagi Pelapak di E-commerce dalam Pemenuhan Ketentuan Iklan”** di Amaroossa Royal Hotel, Bogor pada tanggal 15-16 Agustus 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelapak (*reseller*) dalam beriklan yang berdaya saing serta memenuhi ketentuan agar masyarakat mendapatkan informasi produk kosmetik yang

objektif, tidak menyesatkan, dan tidak menyatakan seolah-olah obat. Selain



dari sisi pemahaman pelapak, kegiatan ini juga bertujuan mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan iklan kosmetik di media online, sehingga iklan yang tidak memenuhi ketentuan dapat segera dihentikan

penayangannya. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid tersebut terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu Pendampingan bagi Pelapak di *E-Commerce* dalam Pemenuhan Ketentuan Iklan Kosmetik pada tanggal 15 Agustus 2022 dan Desk tindak lanjut hasil pengawasan iklan dan penandaan kosmetik pada tanggal 16 Agustus 2022.

Kegiatan ini dihadiri oleh pengelola penyedia platform marketplace dan pelapak dari Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Blibli, Shopee. Selain dari marketplace, kegiatan juga dihadiri perwakilan lintas sektor yaitu Dewan Periklanan Indonesia (DPI), Indonesian E-Commerce Association (idEA), Asosiasi Digital Indonesia (ADI), Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (PERKOSMI) dan Internal Badan POM.

Para pelapak pada kegiatan pendampingan ini mendapatkan materi sebagai berikut:

- a. Pembukaan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si, yang menyampaikan bahwa dalam menghadapi situasi perubahan selama pandemi, Badan POM sebagai regulator turut andil dalam mendukung pelaku usaha sehingga diharapkan pelaku usaha kosmetik dapat terus tumbuh dan berkembang dalam kondisi pandemi maupun pasca pandemi.
- b. Materi Tren hasil pengawasan kosmetik disampaikan oleh Direktur Pengawasan Kosmetik, Drs. Arustiyono, Apt, MPH.
- c. Materi Etika Pariwara Indonesia disampaikan oleh Dewan Periklanan Indonesia, Ir. Bambang Sumaryanto, MBA, M.Si.
- d. Materi Ketentuan Iklan Kosmetik disampaikan oleh Koordinator Pengawasan Informasi Produk Kosmetik, Wiwin Widya Prastiwi, S.Si, Apt.

- e. Materi Peran Indonesian E-Commerce Association (idEA) dalam Pengawasan dan Pembinaan Marketplace disampaikan oleh Ketua Umum Indonesian E-Commerce Association (idEA), Bima Laga.
- f. Materi Iklan yang Menarik dan Beretika disampaikan oleh Praktisi Digital Marketing , Tuhu Nugraha



Pada hari kedua, tanggal 16 Agustus 2022 dilaksanakan kegiatan Desk Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Iklan Dan Penandaan Kosmetik. Pada kegiatan Desk tindak lanjut dengan marketplace dilakukan pembahasan



untuk menyelesaikan temuan iklan yang Tidak Memenuhi Ketentuan. Kegiatan desk dihadiri oleh 11 (sebelas) perwakilan pengelola marketplace dan 13 (tiga belas) perusahaan kosmetik, dengan hasil dari total temuan 345 tautan iklan yang tidak memenuhi ketentuan, sejumlah 303 tautan telah di *takedown*.

Dengan dilakukannya kegiatan pendampingan kepada pelapak atau *reseller* di marketplace, diharapkan para pelapak ini dapat mengetahui dan menerapkan ketentuan dalam membuat iklan kosmetik di media online. Sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi kosmetik yang objektif dan tidak menyesatkan.

j. Dialog Interaktif "Prospek Ekspor Kosmetik Tematik/Natural Cosmetics dan Dukungan Pemerintah dalam Ekspor Kosmetik"

Dalam rangka mendukung program pemerintah "Indonesia Spice Up the World", Badan POM telah menyelenggarakan Badan POM Week dalam Expo 2020 Dubai pada tanggal 25 Februari–3 Maret 2022 di Paviliun Indonesia, Uni Emirat Arab. Partisipasi Badan POM pada Expo 2020 Dubai bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah RI dalam rangka memperluas ekspor produk Indonesia ke pasar global dan meningkatkan akses informasi produk Obat dan Makanan, termasuk Kosmetika di negara mitra tujuan ekspor.



Partisipasi dalam Expo 2020 Dubai ini sebagai bentuk komitmen Badan POM, khususnya Direktorat Pengawasan Kosmetik untuk meningkatkan daya saing produk kosmetika Indonesia serta menarik investasi di pasar global. Selain itu, Badan POM secara proaktif mengomunikasikan "*Healthy Life for a Better Future*" kepada masyarakat nasional maupun internasional dengan mengonsumsi obat dan makanan dari Indonesia yang khasiat, kualitas dan keamanannya telah terjamin oleh Badan POM. Untuk mendukung hal tersebut, Direktorat Pengawasan Kosmetik turut berpartisipasi dalam sejumlah kegiatan yang terdiri dari Pameran Produk dan Konten Digital di Rolling Exhibition, Business Forum dan Business Matching Kosmetika, dan Seminar "*Indonesian Government Policy to Support Investment in Food and Drug Sector Industry*".

Pada area Rolling Exhibition, Direktorat Pengawasan Kosmetik menampilkan sekitar 43 produk Kosmetika dari 9 perusahaan. Pada kesempatan tersebut, juga ditampilkan video profile Badan POM serta video promosi dari perusahaan.

Selain itu, Direktorat Pengawasan Kosmetik juga terlibat dalam Business Forum mengundang regulator mitra dari regulator pangan dari Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) Republik Turki, regulator kosmetik dari PCIM-H India, TGA Australia dan NMPA RRT. Kegiatan tersebut bertujuan untuk pertukaran informasi terkait perizinan pemasukan produk antar regulator, Badan POM juga memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk bertanya langsung kepada regulator mengenai kebijakan, regulasi, standardisasi, dan hambatan yang akan dihadapi ketika akan melakukan ekspor produk obat dan makanan ke negara Turki, Australia, India, dan Republik Rakyat Tiongkok.

SK 5

Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik

SK 5. Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik

Pada tahun 2022 capaian sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai/Loka POM dalam pengawasan kosmetik adalah sebesar 113.24% capaian tersebut masuk dalam kategori memenuhi ekspektasi. Sasaran kegiatan tersebut didukung oleh 1 indikator kinerja utama yaitu Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik.

IK-8. Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik, indikator ini bertujuan untuk memberikan arahan, pembinaan, pendampingan terhadap UPT guna meningkatkan kualitas pengawasan kosmetik di wilayahnya masing-masing.

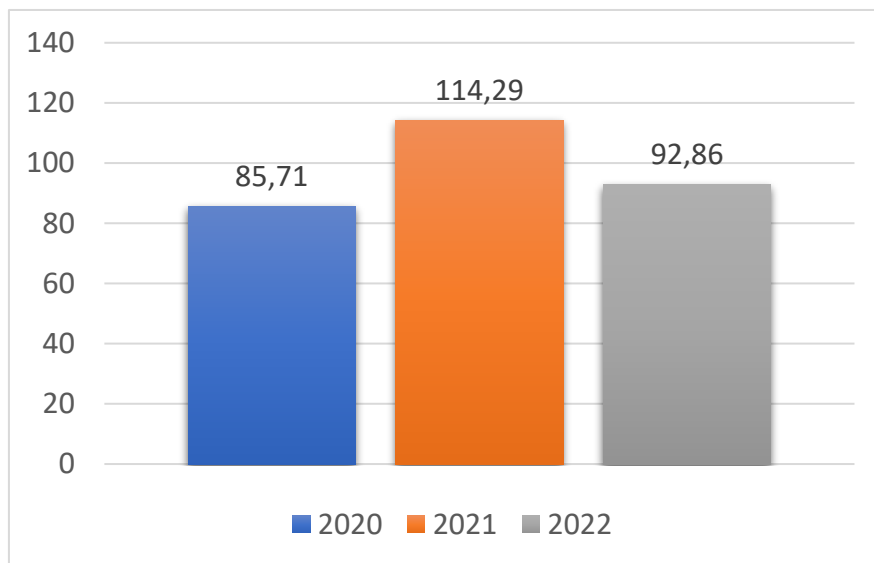
Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2022

Tabel 19 Realisasi Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	82	92.86	113.24	Memenuhi Ekspektasi

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi IK-8 adalah sebesar 92.86% dengan capaian 113.24% dibandingkan dengan target tahun 2022. Capaian tersebut masuk dalam kategori Memenuhi Ekspektasi.

Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 18 Perbandingan Realisasi Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data di atas dapat dilihat perbandingan realisasi dari tahun 2020 – 2022. Realisasi untuk indikator Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2021. Namun mengalami penurunan pada tahun 2022

Perbandingan Realisasi tahun 2022 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Tabel 20 Realisasi tahun 2022 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	84	92.86	110.55	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi IK-8 tahun 2022 telah mencapai target jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra. Namun tetap harus diperlukan upaya perbaikan guna mempertahankan capaian kinerja agar target pada akhir tahun renstra dapat tercapai.

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022 dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan Meningkatkan kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik adalah sebagai berikut

a. Pemantapan Kerja Pengawasan Kosmetik serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor



Disadari bahwa dalam melakukan kegiatan pengawasan kosmetik, Direktorat Pengawasan Kosmetik tidak dapat menjadi single player. Diperlukan kerjasama dan koordinasi yang efektif dan sinergis dengan lintas sektor dan masyarakat agar

pelaksanaan pengawasan kosmetik berjalan efektif.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemantapan kerja pengawasan kosmetik dan peningkatan kerjasama lintas sektor diantaranya melalui rapat koordinasi dengan lintas sektor, pertemuan dalam rangka sosialisasi

kebijakan pengawasan serta pembinaan kepada pelaku usaha di bidang kosmetik.

Selain melakukan Kerjasama terhadap lintas sector direktorat pengawasan



kosmetik juga melakukan bimbingan atau supervise kepada upt badan pom yang ada di provinsi. Pada tahun 2022 Direktorat pengawasan kosmetik telah melakukan supervise terhadap 13 UPT Badan POM. Supervise yang dilakukan berupa pemaparan materi terkait

pengawasan kosmetik serta diskusi tentang permasalahan-permasalahan yang sering muncul terkait pengawasan kosmetik di wilayah upt tersebut. Selain itu dilakukan juga kunjungan ke sarana kosmetik yang terdapat di wilayah tersebut guna melihat langsung permasalahan atau kendala yang dihadapi di lapangan agar masalah tersebut dapat terselesaikan. Serta pemberian bimbingan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan yang berlaku.

SK 6

Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik

SK 6. Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik Pada tahun 2022 capaian sasaran kegiatan Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik adalah sebesar 104.12% capaian tersebut masuk dalam kategori memenuhi ekspektasi. Sasaran kegiatan tersebut didukung oleh 2 indikator kinerja utama yaitu 1). Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu, 2). Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik.

IK-9. Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu, indicator ini bertujuan untuk mengukur tingkat ketepatan

waktu terhadap penyelesaian pengajuan/permohonan pelayanan public yang diterima.

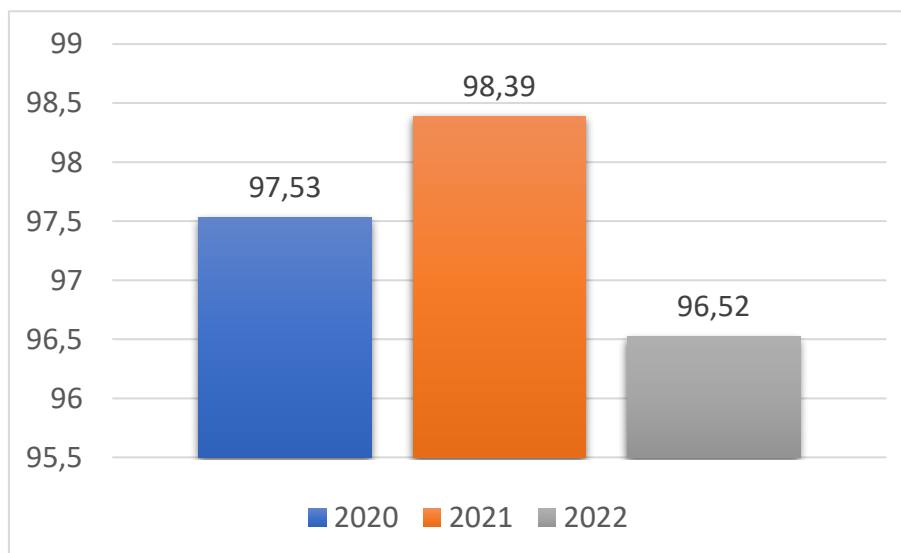
Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2022

Tabel 21 Realisasi Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu	92	96.52	104.91	Memenuhi Ekspektasi

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi IK-9 adalah sebesar 96.52% dengan capaian 104.91% dibandingkan dengan target tahun 2022. Capaian tersebut masuk dalam kategori Memenuhi Ekspektasi.

Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 19 Perbandingan Realisasi Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dari tahun 2020 – 2022. Realisasi untuk Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu mengalami kenaikan pada tahun 2021.

Namun mengalami penurunan pada tahun 2022 namun masih berada di atas target pada tahun 2022.

Perbandingan Realisasi tahun 2022 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Tabel 22 Realisasi tahun 2022 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu	94	96.52	102.68	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi IK-9 tahun 2022 telah mencapai target jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra. Namun tetap harus diperlukan upaya perbaikan guna mempertahankan capaian kinerja agar target pada akhir tahun renstra dapat tercapai.

IK-10. Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik, indicator ini bertujuan untuk mengukur kinerja pelayanan public di Direktorat Pengawasan Kosmetik berdasarkan 6 aspek yaitu kebijakan pelayanan, profesionalitas sdm, sarana dan prasarana, system informasi pelayanan public, konsultasi dan pengaduan, inovasi. Penilaian indicator ini dilakukan oleh biro hukor.

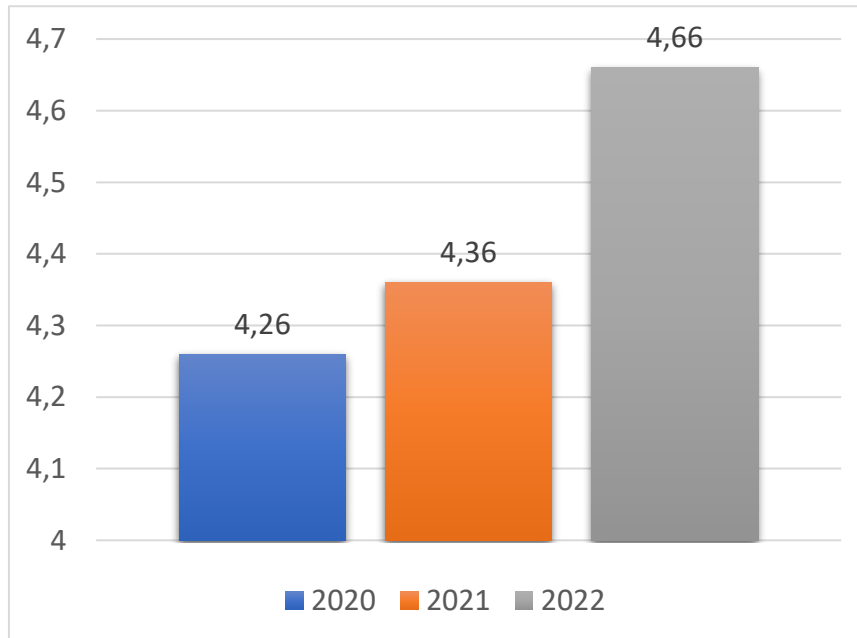
Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2022

Tabel 23 Realisasi Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik	4.51	4.66	103.33	Memenuhi Ekspektasi

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi IK-10 adalah sebesar 4.66 dengan capaian 103.33% dibandingkan dengan target tahun 2022. Capaian tersebut masuk dalam kategori Memenuhi Ekspektasi.

Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 20 Perbandingan Realisasi Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dari tahun 2020 – 2022. Realisasi untuk Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik mengalami kenaikan setiap tahunnya. Ini dikarenakan direktorat pengawasan kosmetik terus melakukan upaya perbaikan-perbaikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publiknya.

Perbandingan Realisasi tahun 2022 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Tabel 24 Realisasi tahun 2022 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik	4.65	4.66	100.22	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi IK-10 tahun 2022 telah mencapai target jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra. Namun tetap harus diperlukan upaya perbaikan guna mempertahankan capaian kinerja agar target pada akhir tahun renstra dapat tercapai.

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022 dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik adalah sebagai berikut

a. Penilaian Penerapan CPKB pada Industri Kosmetik dalam rangka Sertifikasi

Penilaian penerapan CPKB pada Industri Kosmetik dalam rangka sertifikasi merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik dalam menjalankan fungsinya untuk melaksanakan inspeksi dan penilaian sarana/fasilitas produksi kosmetik. Industri kosmetik dalam membuat kosmetik wajib menerapkan pedoman CPKB maka sebelum



suatu industri dapat melakukan kegiatan produksi kosmetik perlu dilakukan penilaian terhadap penerapan pedoman CPKB pada industri kosmetik. Penilaian tersebut dilakukan melalui pemeriksaan sarana/fasilitas industri kosmetik dan evaluasi

dokumen penerapan 12 aspek CPKB. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah bukti penerapan CPKB berupa sertifikat CPKB yang dapat digunakan oleh industri kosmetik untuk menotifikasikan produknya. Selama tahun 2022, sertifikat CPKB yang diterbitkan sebanyak 355 sertifikat untuk 125 industri. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan jumlah yang diterbitkan pada tahun 2021 yaitu 240 sertifikat untuk 84 industri. Hal ini menunjukkan bahwa industri kosmetik di Indonesia tetap berkembang meski pada tahun 2020 hingga awal tahun 2022, dunia sedang dilanda pandemi Covid-19.

Sebagai salah satu upaya Badan POM untuk tetap menjaga efektivitas dan efisiensi pelayanan publik selama pandemi Covid-19, penerbitan sertifikat CPKB dilakukan dengan mekanisme

conditional approval/persetujuan bersyarat, dimana penilaian penerapan CPKB pada industri kosmetik dilakukan tidak melalui pemeriksaan sarana secara *onsite*, melainkan hanya melalui evaluasi dokumen dan foto sarana/fasilitas atau pemeriksaan sarana dan evaluasi dokumen secara *online* sehingga sertifikat CPKB yang diterbitkan

belum berlaku secara penuh sampai dilakukannya pemeriksaan sarana/fasilitas dilakukan secara *onsite*. Pada pertengahan hingga akhir tahun 2022, Direktorat Pengawasan Kosmetik juga telah melakukan pemeriksaan sarana/fasilitas secara *onsite* terhadap beberapa industri kosmetik yang telah mendapat sertifikat CPKB dengan mekanisme *conditional approval* pada tahun 2020 – 2021. Terhadap industri kosmetik yang telah menyelesaikan CAPA terhadap pemeriksaan onsite tersebut, dilakukan pencabutan status *conditional approval* terhadap sertifikat CPKB yang diterbitkan, sehingga sertifikat CPKB tersebut dapat berlaku penuh sesuai masa berlaku sertifikat CPKB



b. Konsultasi Pelayanan Sertifikasi Sarana Kosmetik

Dalam rangka memberikan pelayanan publik sertifikasi sarana kosmetik yang prima, Direktorat Pengawasan Kosmetik memberikan layanan konsultasi untuk semua jenis layanan sertifikasi sarana kosmetik secara *offline* maupun *online*. Adapun pemberian layanan konsultasi secara *offline* dilakukan secara rutin setiap hari kerja di lantai 6 gedung Athena Badan POM, sedangkan layanan konsultasi secara *online* dilakukan melalui berbagai media, meliputi: *whatsapp*, *e-mail*, dan *zoom meeting*. Hadirnya layanan konsultasi secara *online* ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19 dimana pada masa

produk kosmetik yang beredar di masyarakat untuk tetap menjaga masyarakat agar tetap aman dalam menggunakan kosmetik

SK 7

Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang Efektif

SK 7. Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang Efektif

Pada tahun 2022 capaian sasaran kegiatan Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang Efektif adalah sebesar 112.02% capaian tersebut masuk dalam kategori memenuhi ekspektasi. Sasaran kegiatan tersebut didukung oleh 1 indikator kinerja utama yaitu Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik **IK-11**. Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik, indicator ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan reformasi dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi.

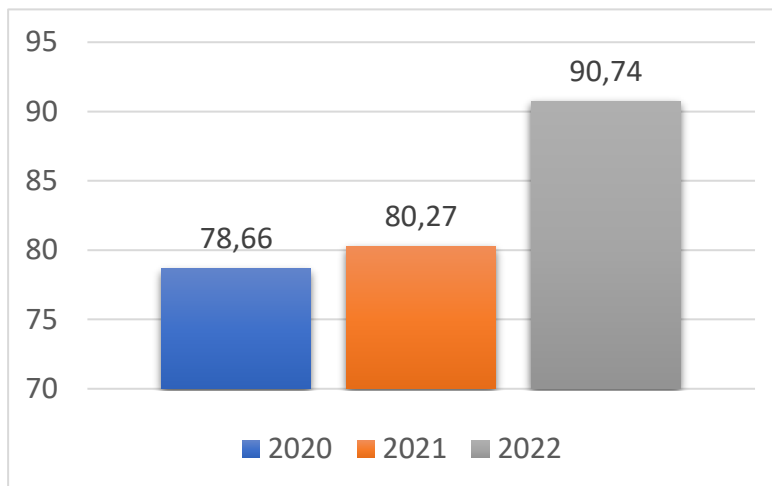
Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2022

Tabel 25 Realisasi Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik	81	90.74	112.02	Memenuhi Ekspektasi

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi IK-11 adalah sebesar 90.74% dengan capaian 112.02% dibandingkan dengan target tahun 2022. Capaian tersebut masuk dalam kategori Memenuhi Ekspektasi.

Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 21 Perbandingan Realisasi Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dari tahun 2020 – 2022. Realisasi untuk Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik mengalami kenaikan setiap tahun nya.

Perbandingan Realisasi tahun 2022 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Tabel 26 Realisasi tahun 2022 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik	83	90.74	109.33	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi IK-11 tahun 2022 telah mencapai target jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra. Namun tetap harus diperlukan upaya perbaikan guna mempertahankan capaian kinerja agar target pada akhir tahun renstra dapat tercapai.

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022 dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang Efektif adalah sebagai berikut

a. Pemenuhan Keperluan Perkantoran

Keperluan sehari-hari perkantoran digunakan untuk membiayai keperluan sehari-hari pada Direktorat Pengawasan Kosmetik yang menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar dapat memberikan pelayanan secara optimal, seperti barang cetak, air minum pegawai, langganan video conference zoom, langganan License Ms. Office dll. Layanan perkantoran dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan

b. Pemantapan Sistem Manajemen Mutu Direktorat Pengawasan Kosmetik

Dalam rangka mendukung kinerja Badan POM dalam program reformasi birokrasi penataan dan penguatan tata laksana, sebagai salah satu unit pelayanan publik di Badan POM, Direktorat Pengawasan Kosmetik menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas dan terukur demi tercapainya birokrasi yang efektif dan efisien.

Sebagai upaya memastikan efektivitas sistem mutu maka dilakukan audit, baik internal maupun eksternal, secara obyektif dan berkala. Tujuan audit adalah : 1) Mengevaluasi kecukupan persyaratan mutu yang telah dikembangkan, 2) Menentukan kesesuaian penerapan sistem mutu dengan kriteria sistem informasi yang diterapkan, 3) Melihat apakah sistem telah diterapkan dan dipelihara secara efektif, 4) Mengevaluasi pemenuhan persyaratan mutu, 5) Mengevaluasi kinerja penerapan sistem mutu dan melihat peluang perbaikan untuk kesempurnaan sistem mutu.

Audit internal Direktorat Pengawasan Kosmetik dilaksanakan pada tanggal 6-7 Juni 2022 dengan tim auditor internal dari Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan. Sedangkan audit eksternal diselenggarakan pada tanggal 2 Agustus 2022 oleh auditor dari Sucofindo

Berdasarkan hasil audit internal telah dilakukan beberapa tindakan perbaikan, sedangkan pada audit eksternal tidak ditemukan temuan yang bersifat non conformities (NC) maupun minor, namun hanya saran untuk perbaikan.

c. Penyusunan dan Internalisasi Kebijakan Kedeputian II

Kegiatan penyusunan dan internalisasi kebijakan kedeputian II merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mensosialisasikan nilai-nilai organisasi Badan POM dan arah kebijakan Kedeputian II, serta konsolidasi internal untuk meningkatkan koordinasi antar unit di Kedeputian II. Kegiatan ini melibatkan seluruh staf dan pejabat struktural di lingkungan Kedeputian II.

d. Penataan Arsip Direktorat Pengawasan Kosmetik

Visi Pengelolaan kearsipan sebagai pusat memori Badan Pengawas Obat dan Makanan (Direktorat Pengawasan Kosmetik) dalam rangka mewujudkan pengelolaan kearsipan yang efektif dan efisien serta memenuhi persyaratan akuntabilitas dan transparansi.

Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan internal Badan POM Direktorat Pengawasan Kosmetik mendapat nilai 95,77 kategori Sangat Memuaskan. Kegiatan pengelolaan arsip telah dilakukan

1. Sosialisasi Tata Naskah Dinas sesuai Peraturan Badan POM no 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas pada tanggal 29 Juli 2022
2. Sosialisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) pada tanggal 30 Juni 2022
3. Pengelolaan arsip aktif dengan melakukan pemberkasan arsip aktif dan pembuatan daftar arsip aktif. Pelaporan daftar arsip aktif 2022 ke Biro Umum telah dilakukan sebanyak dua kali pada tanggal 10 April 2022 dan 17 Maret 2023
4. Arsip aktif yang telah habis masa retensinya sesuai pedoman Jadwal Retensi Arsip dilakukan penyusutan arsip. Pengelolaan arsip inaktif dengan melakukan penyeleksian arsip, penataan arsip dan pemindahan arsip dengan melakukan rapat pembahasan secara internal pada tanggal 31 Agustus 2022, 12 September 2022 dan 14 Oktober 2022. Pemindahan arsip aktif Direktorat Pengawasan Kosmetik yang telah habis masa retensinya ke Biro Umum dilakukan pada tanggal 16 Maret 2023..

e. Penggalangan komitmen bersama stakeholder dan lintas sektor dalam rangka Direktorat Pengawasan Kosmetik mencapai WBBM



Pada tahun 2020 Direktorat Pengawasan Kosmetik telah mendapatkan predikat WBK dari Kementerian PAN-RB. WBK merupakan predikat yang diberikan oleh kementerian PANRB untuk instansi atau unit kerja yang memenuhi Sebagian besar

manajemen perubahan, panataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Sebagai Langkah untuk melangkah ke tahap selanjut nya untuk meraih predikat WBBM. Dalam mencapai predikat WBBM di perlukan komitmen antara pimpinan, seluruh pegawai di direktorat pengawasan kosmetik serta serta para stake holder. Sebagai wujud nyata dalam mencapai predikat wbbm maka dilaksanakan kegiatan Penggalangan komitmen bersama stakeholder dan lintas sektor dalam rangka Direktorat Pengawasan Kosmetik mencapai WBBM.

Dalam kegiatan ini kami mengundang para stake holder untuk dapat melakukan diskusi Bersama serta memberikan masukan-masukan terkait apa saja yang perlu diperbaiki terutama dalam hal pelayanan public. Dalam kesempatan itu juga disampaikan upaya kami dalam mempersiapkan untuk meraih predikat WBBM serta penandatanganan komitmen stake holder dalam mendukung direktorat pengawasan kosmetik meraih predikat wbbm.

Sharing Session Strategi Direktorat Pengawasan Kosmetik Mencapai Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga



dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan professional, karena dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sedangkan terkait sasaran

hasil Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dibutuhkan komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sebagai bentuk komitmen Direktorat Pengawasan Kosmetik dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi maka dilaksanakan kegiatan Sharing Session Strategi Direktorat Pengawasan Kosmetik Mencapai Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Kegiatan sharing session ini sebagai salah satu upaya Direktorat Pengawasan Kosmetik untuk mendapatkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Selama tahun 2022 Direktorat Pengawasan Kosmetik telah berupaya mendapatkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani tetapi belum mendapatkannya sehingga ini menjadikan peluang positif bagi kami agar mendapatkannya di tahun berikutnya. Kegiatan dilaksanakan di Bekasi tanggal 6 Desember 2022 yang dihadiri oleh Direktur serta seluruh pegawai Direktorat Pengawasan Kosmetik dengan menghadirkan narasumber perwakilan dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan di wakili oleh Ibu Adrianti, S.Si, Apt, KPKNL I Tangerang diwakili oleh Ibu Fransisca Murni, SE dan Kantor Imigrasi I Jakarta Selatan diwakili oleh Bapak Susilo Sumedi, A.Md.Im., S.H., M.H. Pada kesempatan ini kami memaparkan upaya apa saja yang telah dilakukan kemudian dilanjut

oleh narasumber yang memberikan tanggapan serta rekomendasi-rekomendasi yang dapat dilakukan oleh direktorat pengawasan kosmetik agar dapat meraih predikat WBBM pada tahun depan.

SK 8

SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal

SK 8. SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal

Pada tahun 2022 capaian sasaran kegiatan SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal adalah sebesar 104.38% capaian tersebut masuk dalam kategori memenuhi ekspektasi. Sasaran kegiatan tersebut didukung oleh 1 indikator kinerja utama yaitu Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik

IK-12. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik, indicator ini bertujuan untuk menggambarkan kualitas ASN berdsarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

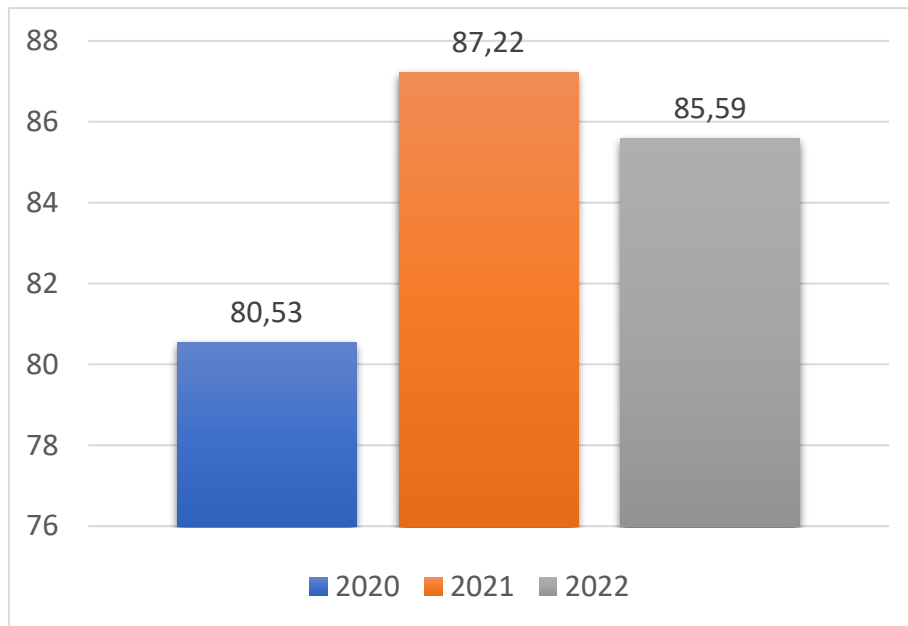
Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2022

Tabel 27 Realisasi Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik	82	85.59	104.38	Memenuhi Ekspektasi

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi IK-12 adalah sebesar 85.59 dengan capaian 104.38% dibandingkan dengan target tahun 2022. Capain tersebut masuk dalam kategori Memenuhi Ekspektasi

Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 22 Perbandingan Realisasi Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dari tahun 2020 – 2022. Realisasi untuk Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik mengalami kenaikan pada tahun 2021 namun mengalami penurunan di tahun 2022. Hal ini dikarenakan banyak pejabat fungsional yang berasal dari penyetaraan/perpindahan jabatan dari jabatan structural ke jabatan fungsional belum melakukan diklat fungsional sesuai dengan jabatan fungsional baru nya. Terutama khusus nya untuk jabatan-jabatan fungsional yang instansi Pembina nya di luar Badan POM / jabatan fungsional selain PFM, Sehingga membuat penilaian indeks ASN mengalami penurunan.

Perbandingan Realisasi tahun 2022 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Tabel 28 Realisasi tahun 2022 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik	84	85.59	101.89	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi IK-12 tahun 2022 telah mencapai target jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra. Namun tetap harus diperlukan upaya perbaikan guna mempertahankan capaian kinerja agar target pada akhir tahun renstra dapat tercapai.

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022 dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal adalah sebagai berikut

a. Pengembangan Kompetensi Inspektur Kosmetik



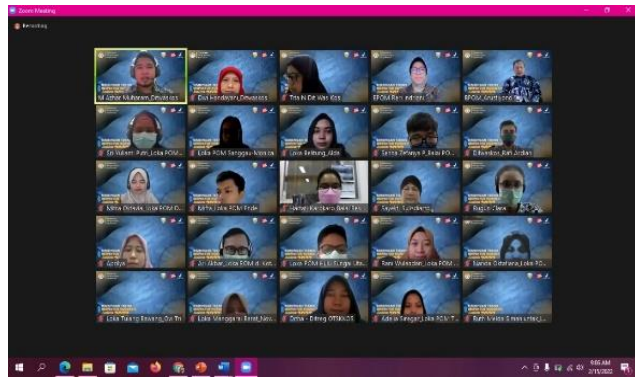
Dalam upaya untuk meningkatkan pengawasan terhadap kosmetika di peredaran, telah dilakukan rangkaian Bimbingan Teknis Inspektur Kosmetik bagi inspektur kosmetik di Balai Besar/ Balai/ Loka POM di seluruh Indonesia

yang dilaksanakan secara *online* oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik, meliputi :

- a. Bimbingan Teknis Inspektur Kosmetik Junior pada tanggal 14 – 17 Februari 2022 (32 peserta dari 29 Balai Besar/ Balai/ Loka POM);
- b. Bimbingan Teknis Inspektur Kosmetik Senior pada tanggal 7-11 Maret 2022 (32 peserta dari 12 Balai Besar/ Balai/ Loka POM); dan
- c. Bimbingan Teknis Pelatihan Inspektur Kosmetik Kepala pada tanggal 11-14 April 2022 (20 peserta dari 13 Balai Besar/ Balai/ Loka POM).



Adapun pemateri dalam bimbingan teknis ini antara lain dari Deputi 2 dan 4 Badan POM, serta tim ahli Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). *Output* dari kegiatan ini diharapkan dapat



meningkatkan kapasitas pengawasan di bidang kosmetik oleh petugas Badan POM di pusat dan di daerah sehingga dapat membantu mewujudkan visi Badan POM yang berbunyi “Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

SK 9

Sistem Operasional termasuk TIK terintegrasi dan adaptif di Direktorat Pengawasan Kosmetik

SK 9. Sistem Operasional termasuk TIK terintegrasi dan adaptif di Direktorat Pengawasan Kosmetik

Pada tahun 2022 capaian sasaran kegiatan Sistem Operasional termasuk TIK terintegrasi dan adaptif di Direktorat Pengawasan Kosmetik adalah sebesar 133.33% capaian tersebut masuk dalam kategori tidak dapat disimpulkan. Sasaran kegiatan tersebut didukung oleh 1 indikator kinerja utama yaitu Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal **IK-13**. Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal, indicator ini bertujuan untuk mengukur pemanfaatan system berbasis elektronik yang digunakan oleh unit kerja. Penilaian terhadap indeks tersebut dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Badan POM.

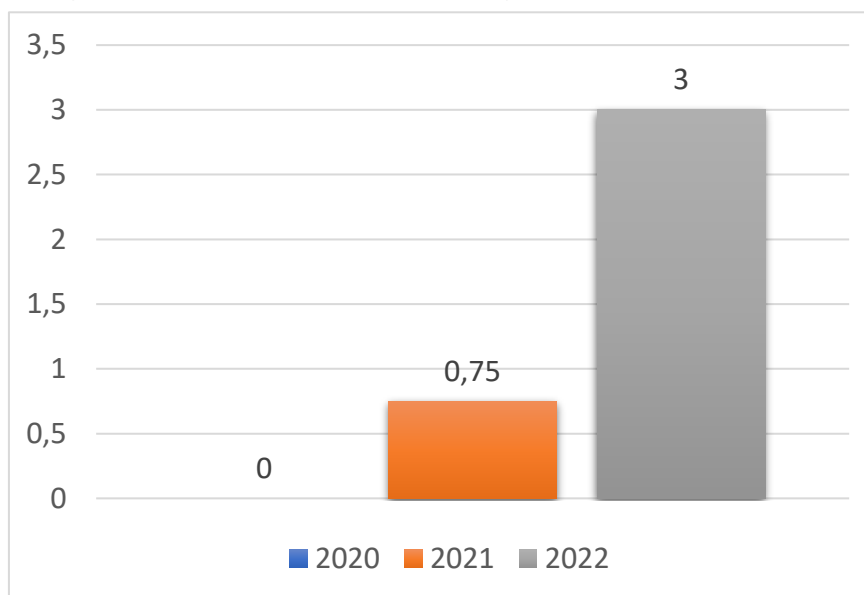
Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2022

Tabel 29 Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	2.25	3	133.33	Tidak Dapat disimpulkan

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi IK-13 adalah sebesar 3 dengan capaian 133.33% dibandingkan dengan target tahun 2022. Capaian tersebut masuk dalam kategori tidak dapat disimpulkan.

Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 23 Perbandingan Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data di atas dapat dilihat perbandingan realisasi dari tahun 2020 – 2022. Realisasi untuk Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Perbandingan Realisasi tahun 2022 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Tabel 30 Realisasi tahun 2022 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	3	3	100	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi IK-13 tahun 2022 telah mencapai target jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra. Namun tetap harus diperlukan upaya perbaikan guna mempertahankan capaian kinerja agar target pada akhir tahun renstra dapat tercapai.

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022 dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan Sistem Operasional termasuk TIK terintegrasi dan adaptif di Direktorat Pengawasan Kosmetik adalah sebagai berikut

a. Rapat Pembahasan Aktual Direktorat Pengawasan Kosmetik

Kegiatan rapat internal Direktorat Pengawasan Kosmetik dalam membahas topik-topik serta isu-isu actual terkait pengawasan kosmetik, serta rapat pembahasan monitoring dan evaluasi atas kinerja Direktorat serta tindak lanjut yang akan dilakukan untuk berikutnya

SK 10

Terkelolanya keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik secara Akuntabel

SK 10. Terkelolanya keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik secara Akuntabel

Pada tahun 2022 capaian sasaran kegiatan Terkelolanya keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik secara Akuntabel adalah sebesar 100% capaian tersebut masuk dalam kategori memenuhi ekspektasi. Sasaran kegiatan tersebut didukung oleh 1 indikator kinerja utama yaitu Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik

IK-14. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik, indicator ini bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam menghasilkan output atau kinerja yang optimal. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan antara input / anggaran yg digunakan dengan output / hasil capaian kinerja yang dihasilkan.

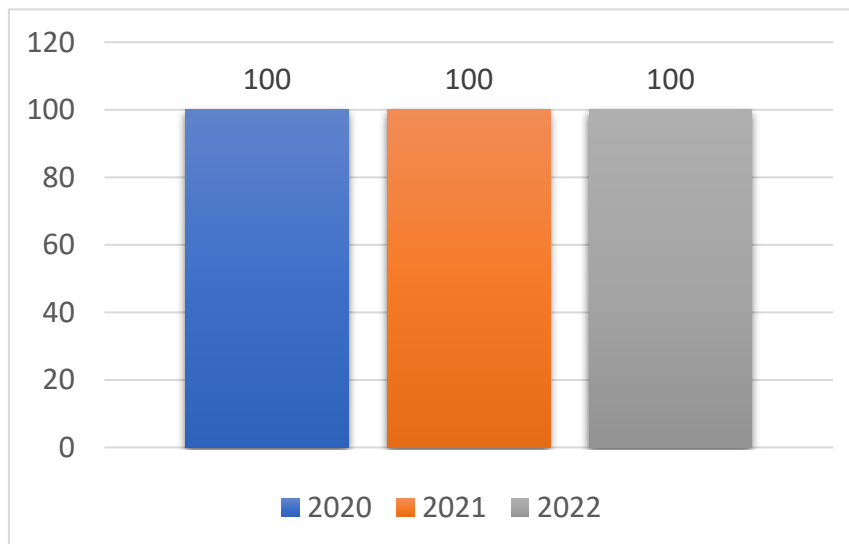
Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2022

Tabel 31 Realisasi Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik	100	100	100	Memenuhi Ekspektasi

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi IK-14 adalah sebesar 100% dengan capaian 100% dibandingkan dengan target tahun 2022. Capain tersebut masuk dalam kategori memenuhi ekspektasi.

Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 24 Perbandingan Realisasi Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dari tahun 2020 – 2022. Realisasi untuk Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik adalah 100% selama 3 tahun artinya Direktorat

Pengawasan Kosmetik telah efisien dalam penggunaan dan pengelolaan anggaran dalam menghasilkan output kinerja.

Perbandingan Realisasi tahun 2022 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Tabel 32 Realisasi tahun 2022 dengan Target Akhir Tahun Renstra

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2022	% Capaian	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	100	100	100	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi IK-14 tahun 2022 telah mencapai target jika dibandingkan dengan target akhir tahun renstra. Namun tetap harus diperlukan upaya perbaikan guna mempertahankan capaian kinerja agar target pada akhir tahun renstra dapat tercapai.

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022 dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan Terkelolanya keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik secara Akuntabel adalah sebagai berikut

a. Honorarium Pengelola Keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik

Pengelola keuangan Satker adalah Tim yang di tunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pentaan Barang Milik Negara (BMN) di Direktorat Pengawasan Kosmetik, Tim ini melakukan pekerjaan diluar tupoksinya sehari-hari sehingga diberikan honorarium, Honorarium pengelolaan keuangan diberikan setiap bulan, dan sudah terealisasi selama 12 bulan

b. Honorarium Pengelola PNPB Direktorat Pengawasan Kosmetik

Pengelola PNPB adalah Tim yang di tunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan Pencatatan, monitoring dan pengelolaan penerimaan PNPB di Direktorat Pengawasan Kosmetik, Tim ini melakukan pekerjaan diluar

tupoksinya sehari-hari sehingga diberikan honorarium, Honorarium pengelolaan PNBP diberikan setiap bulan, dan sudah terealisasi selama 12 bulan

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Tahunan merupakan dokumen monitoring dan evaluasi Direktorat Pengawasan Kosmetik atas pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2022. Laporan ini memuat tujuan, sasaran, dan pelaksanaan berbagai program. Laporan tahunan ini juga merupakan laporan perkembangan dan pencapaian yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik dalam kurun waktu satu tahun. Laporan tahunan ini mencakup laporan kegiatan dan capaian terhadap kinerja kegiatan dengan tujuan untuk menghasilkan upaya yang sinergis dalam rangka evaluasi kegiatan/program Direktorat Pengawasan Kosmetik tahun 2022 dan menjadi tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan di tahun berikutnya secara terpadu melalui penerapan anggaran berbasis kinerja dan koordinasi dari berbagai pihak/pemangku kepentingan seperti instansi pemerintah di tingkat pusat, pemerintah daerah, Pelaku usaha, dan masyarakat

Laporan tahunan ini menggambarkan capaian kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik yang diukur dengan menggunakan 10 Sasaran Kinerja dan 14 Indikator Kinerja. Dari 14 indikator kinerja terdapat 11 Indikator yang mendapatkan kriteria Memenuhi Ekspektasi, 1 Indikator Mendapatkan kriteria Tidak dapat disimpulkan dan 2 Indikator masuk kedalam kriteria belum memenuhi ekspektasi. Dalam pengelolaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik menunjukkan kinerja yang baik dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.139.426.374 atau setara dengan 99,98% dari total Pagu sebesar Rp. 8.140.834.000,-.

SARAN

Dengan tantangan yang dihadapi selama tahun anggaran 2022, Direktorat Pengawasan Kosmetik berkomitmen untuk memperkuat Sistem Pengawasan baik dalam pelaksanaan program pengembangan internal maupun eksternal pada tahun selanjutnya, terutama perencanaan dan monitoring program kegiatan dan pelaksanaan anggaran. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat semakin maraknya Kosmetik Ilegal yang beredar di pasaran.

Lampiran

Rekap Pengembangan Kompetensi yang diikuti Pegawai Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2022

No	Judul Kegiatan Peningkatan Kompetensi	Penyelenggara Kegiatan Peningkatan Kompetensi	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
1	Ngebakso (Ngobrol Seru Soal Kosmetik)	Direktorat Pengawasan Kosmetik	14/09/2022	16/09/2022
2	Pengayaan Uji Praklinik dan Uji Klinik Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	09/06/2022	10/06/2022
3	Workshop Monitoring dan Evaluasi Data Hasil Pengawasan Obat dan Makanan	PPSDM POM dan FKM UI	22/11/2022	24/11/2022
4	Workshop Desain Penandaan dan Iklan dalam Rangka Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Regulasi di Bidang Informasi dan Promosi Kosmetik	Direktorat Pengawasan Kosmetik	22/06/2022	23/06/2022
5	Kerja Sama Selatan-Selatan Badan POM untuk Palestina Tahun 2022 "Indonesian FDA's Support for the Establishment of an Independent Palestinian Food and Drug Authority"	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	20/09/2022	22/09/2022
6	WORKSHOP PENGELOLAAN KEARSIPAN SECARA DIGITAL TAHUN 2022	Biro Umum	20/07/2022	22/07/2022
7	STRATEGI PENYELAMATAN ARSIP COVID	Biro Umum	14/12/2022	14/12/2022
8	Webinar Series: TAGLINE, Strategi Promosi yang Kreatif, Representatif, dan Efektif Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	26/09/2022	26/09/2022
9	Workshop Penerapan QR Code, Logo Halal dan Klaim Kosmetik dalam Pemenuhan Regulasi Penandaan dan Iklan Kosmetik	Direktorat Pengawasan Kosmetik	30/05/2022	31/05/2022
10	Manajemen Risiko	PPSDM POM	14/12/2022	14/12/2022
11	Sosialisasi Farmakovigilans dalam rangka Perkuatan Jejaring Lintas Sektor dalam Pengawasan Keamanan Obat	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	15/08/2022	15/08/2022
12	Webinar Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan BPOM	Inspektorat Utama	19/07/2022	19/07/2022
13	Food Safety, Risk21, and Chemical Incident Management	Chulabhorn Research Institute	06/12/2022	10/12/2022
14	Workshop Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Biro Umum	05/10/2022	07/10/2022

15	WORKSHOP EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DAN SOSIALISASI OMSPAN ATAS IKPA SERTA MEKANISME PELAPORAN DAN MONEV CAPAIAN OUTPUT PADA APLIKASI SAKTI TAHUN 2022	Biro Perencanaan dan Keuangan	06/04/2022	07/04/2022
16	Pelatihan Orientasi CPNS	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	01/03/2022	30/03/2022
17	Capacity Building	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	18/10/2022	18/10/2022
18	Leadership Communication Thru Public Speaking Offline & Online	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	02/12/2022	02/12/2022
19	Pelatihan Pelayanan Publik Time Management & Handling Complaint	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	12/09/2022	13/09/2022
20	Capacity Building Agent of Change BPOM Batch 1 Tahun 2022	PPSDM POM & ACT Consulting	14/03/2022	15/03/2022
21	Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Dasar	PPSDM POM	12/09/2022	12/09/2022
22	Meningkatkan Kinerja dengan Kerjasama Tim Level Dasar		07/12/2022	07/12/2022
23	Meningkatkan Kinerja dengan Kerjasama Tim Level Lanjutan		07/12/2022	07/12/2022
24	Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Lanjutan		11/11/2022	11/11/2022
25	Training Pelayanan Prima Dalam Rangka Perkuatan Pelayanan Publik di Bidang Distribusi Obat	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	07/04/2022	08/04/2022
26	Supervisory Development Program - Managing Team	PPSDM POM	14/12/2022	14/12/2022
27	Supervisory Development Program - Practical Problem Solving	PPSDM POM	14/12/2022	14/12/2022
28	Supervisory Development Programe - Basic Management (POAC)	PPSDM POM	14/12/2022	14/12/2022
29	Kecerdasan Menghadapi Kesulitan	PPSDM POM	29/06/2022	29/06/2022
30	Keamanan Obat dan Makanan, Tantangan dan Solusinya	PPSDM POM dan FMIPA Universitas Udayana	02/12/2022	02/12/2022
31	The Art Of Decision Making	PPSDM POM	28/01/2022	28/01/2022
32	Forum Komunikasi Inspektur Kosmetik• dengan tema Peranan Pengawasan Kosmetik Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional	Direktorat Pengawasan Kosmetik	19/07/2022	20/07/2022
33	Pelatihan Sampling Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Direktorat Pengawasan Kosmetik	06/04/2022	07/04/2022

34	Bimbingan Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional PFM	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	02/09/2022	02/09/2022
35	Pembekalan Evaluator dengan tema Herbal Fermentation	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	29/09/2022	29/09/2022
36	Persyaratan Minimum Pengujian DNA Spesifik Spesies pada Produk Olahan	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	01/09/2022	01/09/2022
37	Pembekalan Evaluator Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan: Regulasi Halal di Indonesia, Implementasi dan Permasalahan yang dihadapi	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	22/04/2022	22/04/2022
38	Bimbingan Teknis Inspektur Kosmetik Junior	Balai Besar POM di Pekanbaru	03/10/2022	07/10/2022
39	Bimbingan Teknis Desain Komunikasi Visual dan Strategi Periklanan dalam Rangka Memenuhi Ketentuan Penandaan dan Promosi Kosmetik	Direktorat Pengawasan Kosmetik	30/08/2022	30/08/2022
40	Bimbingan Teknis Penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) Bagi Petugas Pusat dan Daerah	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	22/02/2022	23/02/2022
41	Pelatihan Teknis Pengujian dan Pembahasan Kendala dalam Sampel Kasus Obat dan Makanan	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	29/03/2022	30/03/2022
42	Pembentukan Inspektur Kosmetik Senior	Direktorat Pengawasan Kosmetik	07/03/2022	11/03/2022
43	Bimbingan Teknis Penilaian Kompetensi Teknis Fungsi Pemeriksaan dan Penyidikan	PPSDM POM	28/12/2022	28/12/2022
44	FOCUS GROUP DISCUSSION JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DI LINGKUNGAN BADAN POM	Biro Umum	26/04/2022	26/04/2022
45	BIMBINGAN TEKNIS DAN SERTIFIKASI PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS TAHUN 2022	Biro Umum	07/06/2022	09/06/2022
46	Analisis Kebutuhan dan Tren Global Pengembangan Kompetensi SDM	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	19/10/2022	19/10/2022
47	BIMBINGAN TEKNIS PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	Biro Umum	04/10/2022	04/10/2022
48	Perizinan Kosmetik	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	12/01/2022	13/01/2022
49	Bimbingan Teknis dalam Rangka Peningkatan Pengawasan bagi Kosmetik Petugas Balai Besar POM di Pontianak dan Loka POM di Sanggau	Direktorat Pengawasan Kosmetik	17/02/2022	17/02/2022
50	Peningkatan Kualitas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Menuju Birokrasi yang Bersih	Inspektorat II	17/05/2022	20/05/2022

	dan Akuntabel, dan Pelayanan Publik yang Prima			
51	Bimbingan Teknis In House Training Dermato-Cosmetic Science	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	17/03/2022	18/03/2022
52	PELATIHAN PELAYANAN PUBLIK DAN BUDAYA PELAYANAN PRIMA	Biro Hukum dan Organisasi	12/05/2022	13/05/2022
53	Pembentukan Inspektur Kosmetik Kepala	Direktorat Pengawasan Kosmetik	11/04/2022	14/04/2022
54	Tenaga Teknis Kefarmasian	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	01/09/2022	01/09/2022
55	Bimbingan Teknis Penilaian Kompetensi Teknis Fungsi Pemantauan KIE dan Pengujian	PPSDM POM	13/12/2022	13/12/2022
56	Pembelajaran Coaching : Problem Solving	PPSDM POM	14/12/2022	14/12/2022
57	BIMBINGAN TEKNIS SURVEILAN QMS ISO 9001:2015	Biro Hukum dan Organisasi	12/05/2022	12/05/2022
58	FGD Penyusunan Juklak Anggaran 2022	Biro Perencanaan dan Keuangan	26/01/2022	27/01/2022
59	Pemberdayaan Pelaku Usaha Garam Kosmetika di Provinsi NTB	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	09/03/2022	09/03/2022
60	WORKSHOP PENGUATAN FUNGSI MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM STRATEGIS PIMPINAN	Biro Perencanaan dan Keuangan	12/07/2022	12/07/2022
61	Pembelajaran Coaching : Peer Group Coaching	PPSDM POM	21/10/2022	21/10/2022
62	Penyusunan dan Penelaahan Soal PPPK Ahli Pertama JF PFM	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	17/05/2022	19/05/2022
63	Bimbingan Teknis Penyusunan Kisi-Kisi Soal Seleksi Kompetensi Teknis PPPK Ahli Pertama	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	14/04/2022	14/04/2022
64	BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI LAPOR DAN SIMPEL VER.2022 DALAM RANGKA PENGUATAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2022	Biro Hukum dan Organisasi	28/09/2022	28/09/2022
65	FGD Penyusunan Laporan Kinerja Badan POM Tahun 2021	Biro Perencanaan dan Keuangan	03/02/2022	04/02/2022
66	BIMBINGAN SAKIP DAN MONITORING DAN EVALUASI ONLINE BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022	Biro Perencanaan dan Keuangan	22/05/2022	25/05/2022
67	FORUM DISKUSI JFP: KONTRIBUSI PERENCANA DALAM MENINGKATKAN PERAN BPOM DI	Biro Perencanaan dan Keuangan	31/08/2022	01/09/2022

	BIDANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN			
68	Sosialisasi dan Internalisasi Employee Branding dan Core Value BerAKHLAK Tingkat Dasar	PPSDM POM	17/06/2022	17/06/2022
69	Riset dan Potensi Pengembangan Produk Probiotik Untuk Kesehatan Serta Tinjauan Regulasi di Beberapa Negara	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	07/06/2022	07/06/2022
70	SOSIALISASI APLIKASI LAYANAN PUSDATIN TAHUN 2022	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	31/08/2022	02/09/2022
71	Sosialisasi dan Pendampingan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pemasukan Kosmetika secara Post Border Bagi Petugas	Direktorat Pengawasan Kosmetik	14/07/2022	14/07/2022
72	Sosialisasi PerBPOM No. 17 tahun 2022	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	21/09/2022	21/09/2022
73	Sosialisasi Rancangan PerBPOM tentang Penerapan Monitoring Efek Samping OTOKSK	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	06/10/2022	06/10/2022
74	Pemberian Umpan Balik yang Efektif dalam Optimalisasi Kinerja	Biro Sumber Daya Manusia	27/09/2022	27/09/2022
75	Cosmetic Intensive Webinar: Boosting Pasar Kosmetikmu Melalui Penandaan dan Iklan yang Baik	Direktorat Pengawasan Kosmetik	13/10/2022	13/10/2022
76	SOSIALISASI TATA NASKAH DINAS DAN PERSIAPAN PENGAWASAN KEARSIPAN EKSTERNAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022	Biro Umum	08/04/2022	08/04/2022
77	SOSIALISASI PENGISIAN INSTRUMEN PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022	Biro Umum	23/02/2022	23/02/2022
78	Pengelolaan Arsip Digital	PPSDM POM	06/10/2022	06/10/2022
79	KIE KEAMANAN DAN MANFAAT SUPLEMEN KESEHATAN DI MASA PANDEMI	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	21/02/2022	21/02/2022
80	INSPOT: Integrated Webinar Series Bahaya OT mengandung BKO	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	05/04/2022	05/04/2022
81	Sosialisasi PerBPOM No. 32 tahun 2021 dan PerBPOM No. 3 tahun 2022	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	01/03/2022	01/03/2022
82	Sosialisasi Rancangan PerBPOM tentang Jenis dan Standar Pelayanan di lingkungan BPOM	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	03/08/2022	03/08/2022

83	Sosialisasi Peraturan di Bidang Produksi dan Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	09/12/2022	09/12/2022
84	Pendampingan UMKM Obat Tradisional oleh Badan POM	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	23/02/2022	23/02/2022
85	Sosialisasi Penyusunan Kerangka Regulasi dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	Biro Hukum dan Organisasi	03/02/2022	04/02/2022
86	Sosialisasi Per BPOM No. 33 tahun 2021	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	25/01/2022	25/01/2022
87	Managing Your Boss	PPSDM POM	03/10/2022	03/10/2022
88	Sosialisasi Standar Mutu Obat Terkini dan Strategi Implementasi untuk Pengawasan Mutu Obat	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	18/05/2022	19/05/2022
89	Workshop Penetapan Potensi Vaksin COVID-19 Berbagai Platform dalam Rangka Penyusunan Standar Mutu (Produk Biologi)	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	15/02/2022	15/02/2022
90	Sosialisasi Peraturan BPOM No. 14 Tahun 2022 Tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat yang Tidak Memenuhi Syarat dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Mutu, dan Label	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	25/08/2022	25/08/2022
91	Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) SDM BPOM "Akselerasi Pengelolaan SDM Berbasis Sistem Merit dalam Mendukung Terwujudnya ASN BPOM Berkelas Dunia"	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	20/04/2022	21/04/2022
92	Sosialisasi Peraturan Badan POM No. 11 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Uji Bioekivalensi dan Keputusan Kepala Badan POM No. 65 Tahun 2022 tentang Daftar Obat Generik Tertentu Wajib Uji Bioekivalensi	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	13/10/2022	13/10/2022
93	Melek Finansial untuk Masa Depan ASN yang Cerah	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	25/02/2022	25/02/2022
94	Seminar KEMANDIRIAN NASIONAL BAHAN BAKU OBAT BAHAN ALAM MELALUI INOVASI TEKNOLOGI DAN PENDEKATAN STANDARDISASINYA	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	03/11/2022	03/11/2022
95	Sosialisasi PerBPOM No. 21 tahun 2022	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	04/11/2022	04/11/2022
96	"SELF AWARENESS" Mengenal Diri dan Mengelola Potensi Diri dalam Optimalisasi Kinerja	Biro Sumber Daya Manusia	10/11/2022	10/11/2022

97	Pola Makan Sehat Dukung Aktivitas Hebat	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	09/05/2022	09/05/2022
98	Sosialisasi rencana penyusunan regulasi di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik tahun 2022	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	12/01/2022	12/01/2022
99	KEPUTUSAN KEPALA BADAN POM TENTANG PENETAPAN DAN PENGAWASAN VITAMIN D DI ATAS 1000 IU SAMPAI 4000 IU SEBAGAI SUPLEMEN KESEHATAN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	07/04/2022	07/04/2022
100	Kepala BPOM Talk : BPOM untuk Indonesia	PPSDM POM	21/12/2022	21/12/2022
101	Kiat Bertahan di Industri Obat Tradisional dan Kiat Menembus Ekspor	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	08/11/2022	08/11/2022
102	Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	14/03/2022	14/03/2022
103	SOSIALISASI APLIKASI SIROUM BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Biro Umum	09/02/2022	10/03/2022
104	Decluttering : Seni Berbenah Rumah, Berbenah Diri	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	19/08/2022	19/08/2022
105	Manajemen Stres	PPSDM POM	29/06/2022	29/06/2022
106	Mengembangkan Kepemimpinan yang Berkinerja Tinggi	PPSDM POM	11/09/2022	11/09/2022
107	Kepemimpinan bagi Manajer Baru	PPSDM POM	10/09/2022	10/09/2022
108	Forum Konsultasi Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2022	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	29/11/2022	29/11/2022
109	Sosialisasi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dan Penelitian di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Pembahasan terkait Perencanaan Pelaksanaannya	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	19/01/2022	19/01/2022
110	Pengembangan Diri dan Orang Lain Tingkat Dasar	PPSDM POM	01/11/2022	01/11/2022
111	Building Relationship With Great Communication	PPSDM POM	28/01/2022	28/01/2022
112	Orientasi Pada Hasil	PPSDM POM	07/02/2022	07/02/2022
113	KALEIDOSKOP PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN BPOM GOES TO SCHOOL/CAMPUS TAHUN 2021	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	22/02/2022	22/02/2022
114	Mencapai Kinerja Puncak melalui Kecerdasan Emosional	PPSDM POM	12/05/2022	12/05/2022
115	Integritas ASN	PPSDM POM	31/01/2022	31/01/2022

116	Sharing Knowledge Alumni Tugas Belajar BPOM	PPSDM POM	23/03/2022	23/03/2022
117	Interpretasi Data Terpilah	Biro Perencanaan dan Keuangan	20/09/2022	20/09/2022
118	Pelatihan Pengelolaan Data dan Informasi Gender	Biro Perencanaan dan Keuangan	30/09/2022	30/09/2022
119	Best Practice Implementasi SAKIP dan Entry Meeting Evaluasi SAKIP TA 2022	Inspektorat Utama	18/10/2022	19/10/2022
120	SARASEHAN PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA DENGAN IBU KEPALA BADAN POM	Biro Perencanaan dan Keuangan	01/12/2022	02/12/2022
121	PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZI MENUJU WBK/WBBM	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	25/11/2022	25/11/2022
122	Pendampingan bagi Pelapak di E-Commerce dalam Pemenuhan Ketentuan Iklan Kosmetik	Direktorat Pengawasan Kosmetik	15/08/2022	16/08/2022
123	Pelatihan Teknis Food Inspector Tingkat Muda	PPSDM POM	22/12/2022	22/12/2022
124	PEMENGUJIAN MIKROBIOLOGI PADA PRODUK KOSMETIKA SESUAI METODE ISO• TEORI	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	11/07/2022	11/07/2022
125	WORKSHOP DIGITAL PAYMENT DAN IMPLEMENTASI KARTU KREDIT PEMERINTAH TAHUN 2022	Biro Perencanaan dan Keuangan	19/05/2022	20/05/2022
126	Webinar Pengelolaan Hewan Uji dalam Uji Praktikum	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	24/03/2022	24/03/2022
127	Pendampingan UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik oleh UPT Badan POM	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	05/01/2022	05/01/2022
128	Focus Group Discussion Pencegahan Potensi Pelanggaran Peredaran Krim Wajah Racikan yang Tidak Memenuhi Ketentuan	Direktorat Cegah Tangkal	01/09/2022	01/09/2022
129	Tips Cerdas Menulis KTI	PPSDM POM	08/02/2022	08/02/2022
130	Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan	PPSDM Badan POM	06/12/2022	06/12/2022
131	Fundamentals of Risk Assessment	Chulabhorn Research Institute	28/11/2022	03/12/2022
132	Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Tingkat Basic	Biro Perencanaan dan Keuangan	02/09/2022	02/09/2022
133	E-Learning Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Angkatan IV	Kemenkeu Learning Center	21/03/2022	29/03/2022
134	WORKSHOP PELAKSANAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2022	Biro Umum	21/03/2022	24/03/2022
135	Pelatihan Jabatan Fungsional PFM Ahli	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	02/02/2022	27/04/2022

		Pengawasan Obat dan Makanan		
136	Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Ahli dan Terampil	PPSDM POM	14/12/2022	14/12/2022
137	E-Learning Jabatan Fungsional Pranata dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Angkatan IV	Kemenkeu Learning Center	06/06/2022	17/06/2022

Lampiran

ABK Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2022

No	Jabatan	Analisis Beban Kerja	Bezzeting	Gap
1	Direktur Pengawasan Kosmetik	1	0	1
2	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Utama	1	1	0
3	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	10	6	4
4	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	33	16	17
5	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	35	5	30
6	Arsiparis Ahli Pertama	1	0	1
7	Arsiparis Mahir	1	0	1
8	Arsiparis Terampil	3	1	2
9	Pranata Komputer Mahir	1	0	1
10	Pranata Komputer Terampil	1	0	1
11	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1	1	0
12	Analisis Anggaran Ahli Muda	1	0	1
13	Perencana Ahli Muda	1	0	1
14	Perencana Ahli Pertama	2	1	1
15	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	1	0	1
16	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	0	1
17	Pranata SDM Aparatur Mahir	1	0	1
18	Pranata SDM Aparatur Terampil	1	0	1
19	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	0	1
20	Pranata Keuangan APBN Terampil	2	2	0
21	Analisis Barang Milik Negara	1	1	0
22	Pelaksana	1	1	0
23	Pengawas Farmasi dan Makanan Keahlian	6	6	0
	TOTAL	106	41	65

Plt. Direktur Pengawasan Kosmetik

Irwan, S, Si. Apt., MKM



waskos.pom.go.id



@waskos.bpom



Direktorat Pengawasan
Kosmetik BPOM RI